

RISET POTENSI DAN PERAN GENERASI MUDA DALAM PEMBANGUNAN DESA

Tantangan dan Peluang Mendorong Partisipasi dan
Pelibatan Generasi Muda dalam Pembangunan
di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon,
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur



Riset potensi dan peran generasi muda dalam pembangunan desa

Penyusun : Daya Data Komunitas

80 Halaman

Daya Data Komunitas

Copy rights reserved 2026

Menara Cakrawala Lantai 12 Unit 5A

Jalan M.H. Thamrin Kavling 9 Jakarta Pusat 10340 Indonesia

www.dayadata.id

DAFTAR ISI



1	Kata Pengantar
3	Ringkasan Eksekutif
5	Perencanaan Strategis

12 BAB I : Pendahuluan

12	Latar Belakang
13	Tujuan dan Hasil Penelitian
14	Lokasi Penelitian



16 BAB II : Gambaran Umum Desa Tepian Langsung

16	Demografi
13	Potensi Desa
14	Lokasi Penelitian



20 BAB III : Temuan dan Pembahasan

20	Profil Responden
25	Kondisi Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Warga Desa
43	Peningkatan Kapasitas Orang Muda
48	Kinerja Pemerintah Desa

56 BAB IV : Hasil Analisis

56	Dominasi Penduduk Asli di Tengah Kesetaraan Akses Antar-Dusun
58	Mengapa Pendidikan Belum Menjamin Tingkat Kesejahteraan?
60	Antara Luas Aset dan Rendahnya Nilai Tambah Ekonomi
62	Relasi Kuasa dan Terbatasnya Ruang Partisipasi Pemuda
63	Persepsi Eksklusi: Temuan dari Metode Visual Partisipatif



65	Kesimpulan dan Rekomendasi
71	Daftar Pustaka
73	Lampiran

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

20	Grafik 3.1	Jumlah Responden
21	Grafik 3.2	Jenis Kelamin Responden
21	Grafik 3.3	Kelompok Usia Responden
22	Grafik 3.4	Kelompok Usia Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
22	Grafik 3.5	Asal Suku Responden
23	Grafik 3.6	Status Pernikahan Responden
23	Grafik 3.7	Status Pendidikan Responden
24	Grafik 3.8	Status Bekerja Responden
24	Grafik 3.9	Status Bekerja Responden
25	Grafik 3.10	Kepemilikan Lahan
26	Grafik 3.11	Status Kepemilikan Lahan
26	Grafik 3.12	Luas Lahan Pertanian/Perkebunan
28	Grafik 3.13	Penilaian Kesejahteraan Terhadap Kepemilikan Tanah
29	Grafik 3.14	Jenis Sumber Penghasilan

29	Grafik 3.15	Jumlah Sumber Penghasilan
30	Grafik 3.16	Penerimaan Bantuan Sosial dalam Satu Tahun Terakhir
30	Grafik 3.17	Rata-Rata Penghasilan Rumah Tangga Per Bulan
31	Grafik 3.18	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan
32	Grafik 3.19	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan untuk Pangan
32	Grafik 3.20	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan untuk Transportasi
32	Grafik 3.21	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan untuk Pendidikan
32	Grafik 3.22	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan untuk Komunikasi
32	Grafik 3.23	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan untuk BBM (Termasuk Memasak)
33	Grafik 3.24	Penilaian Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan
34	Grafik 3.25	Penilaian Kesejahteraan Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan



35	Grafik 3.26	Penilaian Responden terhadap Kegiatan Pemuda	47	Grafik 3.41	Usulan Pelatihan untuk Warga
35	Grafik 3.27	Penilaian Responden terhadap Kegiatan Pemudi	48	Grafik 3.42	Penilaian Responden terhadap Kinerja Pemerintah Desa
36	Grafik 3.28	Penilaian Responden: Kegiatan Pemuda di Desa	48	Grafik 3.43	Penilaian Responden terhadap Kinerja Pemerintah Desa Berdasarkan Jenis kelamin
37	Grafik 3.29	Penilaian Responden: Kegiatan Pemudi di Desa	49	Grafik 3.44	Penilaian Responden terhadap Pelibatan Masyarakat oleh Pemerintah Desa
37	Grafik 3.30	Kegiatan Pemuda Bermanfaat	50	Grafik 3.45	Penilaian Responden terhadap Pelibatan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Berdasarkan Jenis Kelamin
38	Grafik 3.31	Kegiatan Pemudi Bermanfaat	53	Grafik 3.46	Prioritas 1: Persoalan yang Perlu Ditangani oleh Pemerintah Desa
39	Grafik 3.32	Kegiatan Pemuda Tidak/Kurang Bermanfaat	54	Grafik 3.47	Prioritas 2: Persoalan yang Perlu Ditangani oleh Pemerintah Desa
40	Grafik 3.33	Kegiatan Pemudi Kurang/Tidak Bermanfaat	54	Grafik 3.48	Prioritas 3: Persoalan yang Perlu Ditangani oleh Pemerintah Desa
40	Grafik 3.34	Penilaian Responden terhadap Perhatian Pemerintah Desa pada Pemuda-Pemudi	64	Tabel 4.1	Klasifikasi Temuan
41	Grafik 3.35	Bukti Pemerintah Desa Mendukung/Memberikan Perhatian pada Pemuda	73	Tabel 4.2	Hasil Analisis Regresi
42	Grafik 3.36	Bukti Pemerintah Desa Belum Mendukung/Memberikan Perhatian pada Pemuda			
43	Grafik 3.37	Usulan Kegiatan Pemuda pada Pemerintah Desa			
44	Grafik 3.38	Menerima Pelatihan Peningkatan Keterampilan atau Pengetahuan dalam 1 Tahun Terakhir			
44	Grafik 3.39	Akses Bantuan dan Program dari Pemerintah Desa			
45	Grafik 3.40	Jenis Pelatihan yang Diterima Responden dalam 1 Tahun Terakhir			



KATA PENGANTAR

Desa Tepian Langsung di Kabupaten Kutai Timur saat ini berada dalam situasi paradoks pembangunan: stabilitas ekonomi rumah tangga yang ditopang oleh sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya melalui skema kemitraan plasma, di satu sisi telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat; namun di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap satu komoditas utama berpotensi menciptakan kerentanan struktural dalam jangka panjang.

Struktur ekonomi desa yang berbasis pada penguasaan aset lahan telah menjadikan stabilitas pendapatan lebih ditentukan oleh kepemilikan sumber daya fisik dibandingkan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, rendahnya literasi keuangan dan belum optimalnya diversifikasi sumber penghidupan meningkatkan risiko ekonomi rumah tangga terhadap fluktuasi harga komoditas serta keterbatasan peluang adaptasi terhadap perubahan pasar.

Pada saat yang sama, potensi demografis generasi muda belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam agenda pembangunan desa. Meskipun keterlibatan pemuda dalam

kegiatan sosial relatif tinggi, kontribusinya terhadap penguatan ekonomi lokal dan inovasi usaha masih terbatas akibat minimnya akses terhadap ruang pengambilan keputusan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan teknis yang berkelanjutan.

Situasi ini menempatkan Desa Tepian Langsung pada titik krusial antara keberlanjutan ekonomi jangka pendek dan kebutuhan transformasi menuju ekonomi desa yang lebih resilien dan inklusif. Tanpa intervensi yang terarah, ketergantungan pada ekonomi monokultur berisiko menghambat regenerasi pembangunan serta membatasi peluang pemanfaatan potensi generasi muda dalam menciptakan nilai tambah ekonomi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan yang tidak hanya berfokus pada stabilisasi pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, peningkatan literasi keuangan, serta integrasi peran pemuda dan perempuan dalam pengelolaan unit usaha strategis desa. Optimalisasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa, serta



dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR), yang berorientasi pada pengembangan nilai tambah komoditas sawit dan inovasi usaha berbasis lokal menjadi kunci dalam mendorong transformasi Desa Tepian Langsung menuju pembangunan desa yang adaptif dan berdaya saing tinggi.

Tak lupa kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Zeky Hamzah, S.E., selaku Kepala Desa Tepian Langsung, beserta seluruh jajaran Pemerintah Desa dan para pihak pendukung lainnya, atas kepercayaan yang diberikan kepada Daya Data Komunitas untuk menginisiasi kerja sama dalam bentuk riset.

Kepercayaan tersebut merupakan fondasi penting bagi terbangunnya sebuah proses pembelajaran bersama yang berbasis data dan bukti, melalui proses yang partisipatif dan inklusif, serta berorientasi pada dampak jangka panjang. Semoga kerja sama berbasis saling percaya ini berkontribusi nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi warga, khususnya generasi muda, melalui pengembangan kapasitas, peminatan, dan pengetahuan dalam mengelola potensi sumber daya alam secara bijak, sehingga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan Desa Tepian Langsung dapat terjaga secara berkelanjutan.

Tepian Langsung, 8 Februari 2026

Daya Data Komunitas



RINGKASAN EKSEKUTIF



KATA KUNCI: GENERASI MUDA; PEMBANGUNAN DESA; KEMITRAAN PLASMA; KEPEMILIKAN ASET; PARTISIPASI ORANG MUDA; EKONOMI MONOKULTUR; DIVERSIFIKASI EKONOMI; INFRASTRUKTUR DESA; TATA KELOLA INKLUSIF; KETAHANAN SOSIAL-EKONOMI; PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; CSR; EKONOMI SIRKULAR; KEBERLANJUTAN; DESA MULTIKULTURAL; TRANSFORMASI EKONOMI DESA.

Desa Tepian Langsung saat ini berada pada titik kritis antara stabilitas ekonomi berbasis sumber daya alam dan tantangan regenerasi pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan luas wilayah lebih dari 200.000 hektar dan komposisi masyarakat yang multikultural—terdiri dari Suku Kutai sebagai penduduk asli serta warga pendatang dari Suku Jawa dan Bugis, desa ini memiliki modal sosial dan demografis yang signifikan untuk mendukung transformasi pembangunan jangka panjang.

Struktur ekonomi desa didominasi oleh sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya melalui skema kemitraan plasma yang memberikan stabilitas pendapatan bagi rumah tangga. Sebanyak 68,89% warga tercatat memiliki lahan, dan kepemilikan aset ini menjadi determinan utama tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari sistem plasma juga memunculkan tantangan struktural bagi pengembangan kapasitas generasi muda. Pendapatan rutin dari hasil perkebunan cenderung menurunkan insentif bagi sebagian pemuda untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau mengembangkan inovasi ekonomi alternatif, karena kebutuhan dasar dinilai telah terpenuhi melalui mekanisme distribusi aset keluarga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan formal belum secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan di tingkat desa. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi lokal yang masih sangat bergantung pada penguasaan aset fisik, terutama lahan sawit, dibandingkan dengan keterampilan atau pengetahuan berbasis pendidikan formal. Akibatnya,

kelompok usia tua yang memiliki akses terhadap kepemilikan lahan tetap mempertahankan posisi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi namun tidak memiliki aset produktif.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses listrik PLN, jaringan komunikasi, dan layanan air bersih masih menjadi hambatan utama dalam mendorong diversifikasi ekonomi desa. Minimnya akses terhadap listrik dan internet tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membatasi peluang pengembangan ekonomi digital, khususnya bagi perempuan dan generasi muda.

Dalam konteks tata kelola desa, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan pembangunan masih bersifat prosedural. Meskipun tingkat kehadiran dalam forum musyawarah desa relatif tinggi, kontribusi substantif dari generasi muda sering kali tidak terakomodasi secara optimal akibat dominasi aktor-aktor senior yang memiliki legitimasi berbasis kepemilikan aset dan relasi sosial tradisional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten diharapkan mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan utama. Pemerintah Desa perlu membuka ruang kelembagaan yang lebih inklusif dengan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk mengelola unit usaha strategis desa. Sementara itu, sektor swasta didorong untuk beralih dari pendekatan bantuan donasi CSR menuju program pendampingan berkelanjutan dalam penguatan kapasitas ekonomi; penguatan sumber daya manusia termasuk anak dan orang muda; dan dukungan akses teknologi tepat guna bagi penyediaan layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan penerangan.

Transformasi Desa Tepian Langsung menuju ekonomi desa yang adaptif dan berdaya saing hanya dapat dicapai melalui integrasi peran generasi muda sebagai aktor utama dalam pembangunan desa, guna mengurangi ketergantungan pada ekonomi monokultur dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

1. KONDISI
AWAL

- Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Tepian Langsat didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kemandirian bagi desa untuk mengelola kepentingannya berdasarkan prakarsa masyarakat. Secara geografis, desa ini memiliki wilayah yang sangat luas mencapai 205.329 hektar yang terbagi ke dalam 4 dusun dan 14 RT. Kondisi demografi menunjukkan jumlah penduduk berkisar antara 3.674 hingga 3.962 jiwa dengan komposisi 1.161 Kepala Keluarga.
- Secara ekonomi, desa ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor perkebunan kelapa sawit melalui skema plasma, di mana sekitar 45,6% pendapatan masyarakat bersumber dari sektor tersebut. Hal ini didukung oleh fakta bahwa 68,89% warga memiliki lahan, dengan mayoritas kepemilikan seluas 2–3 hektar. Meskipun secara ekonomi terlihat stabil, kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan besar; tercatat bahwa 41,11% penduduk hanya lulusan SD, sementara lulusan perguruan tinggi (S1) hanya berkisar antara 6–7%.
- Infrastruktur dasar juga masih dalam tahap pengembangan awal, dengan akses jalan sepanjang 56,4 km yang belum seluruhnya dalam kondisi bagus. Layanan air bersih hanya tersedia melalui 3 unit sarana utama, dan akses terhadap jaringan internet serta listrik belum menjangkau seluruh wilayah dusun secara merata. Kon-

disi-kondisi ini merupakan input dasar yang menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang desa.

2. ANALISIS
SEBAB DAN
AKIBAT
(PROBLEM
STRUCTURE)

- Ketergantungan Ekonomi Monokultur Sebab utama dari kerentanan ekonomi desa adalah dominasi sektor perkebunan sawit sebagai sumber pendapatan tunggal bagi mayoritas rumah tangga. Hal ini mengakibatkan ekonomi desa menjadi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global; jika harga sawit turun, kesejahteraan masyarakat akan langsung terdampak secara signifikan. Akibat jangka panjangnya adalah rendahnya motivasi masyarakat untuk melakukan diversifikasi usaha ke sektor non-tradisional.
- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dominasi lulusan tingkat pendidikan dasar (SD) disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan tinggi dan adanya stabilitas ekonomi instan dari hasil plasma sawit yang membuat dorongan untuk sekolah tinggi menjadi rendah. Akibatnya, produktivitas ekonomi desa menjadi rendah karena minimnya inovasi dan keterbatasan keterampilan dalam mengelola potensi sumber daya alam lainnya secara mandiri.
- Minimnya Partisipasi Generasi Muda Partisipasi pemuda dalam musyawarah pembangunan desa (Musrenbang) saat ini masih di bawah 20%, yang disebabkan oleh



terbatasnya ruang bagi pemuda dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini mengakibatkan stagnasi inovasi pembangunan desa dan lambatnya proses regenerasi kepemimpinan di tingkat desa, sehingga potensi ekonomi digital yang biasanya digerakkan oleh pemuda tidak berkembang.

3. OUTPUT DAN IMPACT (DAMPAK PEMBANGUNAN)

- Output Pembangunan (Hasil Langsung) Melalui intervensi kebijakan strategis, desa menargetkan tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata, termasuk peningkatan jalan layak menjadi 80 km dan jangkauan internet di 100% dusun. Di bidang ekonomi, output yang diharapkan adalah terbentuknya minimal 3 unit usaha BUMDes yang profesional dan peningkatan jumlah UMKM aktif dari 40 unit menjadi 150 unit. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM akan ditandai dengan minimal 500 warga yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi keterampilan.
- Impact Pembangunan (Dampak Jangka Panjang) Dampak jangka panjang yang dituju adalah terwujudnya kemandirian ekonomi desa di mana kontribusi sektor non-sawit mencapai 50%. Transformasi ini akan meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sehingga lebih resilien terhadap krisis global. Dampak akhirnya adalah peningkatan pendapatan rumah tangga minimal sebesar 60% dan terciptanya desa yang mandiri, inovatif, serta berkelanjutan pada tahun 2035.

4. PROBLEM SOLVING DAN REKOMENDASI (CORRECTIVE ACTION)

- Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan BUMDes. Direkomendasikan agar pemerintah desa segera menginisiasi program pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Pengembangan potensi wisata alam, seperti kawasan karst, danau, dan air terjun Plosotan, harus diintegrasikan ke dalam unit usaha BUMDes untuk menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor sawit.
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Pendidikan. Vokasi Langkah korektif yang harus diambil adalah pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan teknologi digital secara masif bagi warga. Desa perlu memberikan bantuan beasiswa pendidikan atau pelatihan vokasi bagi siswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan jumlah lulusan SMA hingga 60% dan S1 hingga 20%.
- Integrasi Peran Generasi Muda Pemerintah desa harus membentuk forum pemuda desa yang aktif dan melibatkan mereka secara langsung dalam pengelolaan unit usaha desa. Pemuda harus diberikan peran sebagai aktor utama dalam inovasi ekonomi digital dan promosi pariwisata desa untuk mempercepat transformasi ekonomi.



5. TARGET
KUANTITATIF
DAN PETA JALAN
(ROADMAP
2035)

Berikut adalah matriks target kuantitatif yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan Desa Tepian Langsung:

Indikator Utama	Baseline (Awal)	Target 2030	Target 2035
Kontribusi Ekonomi Non-Sawit	< 20%	35%	50%
Jumlah UMKM Aktif	± 40 unit	100 unit	150 unit
Akses Air Bersih (Rumah Tangga)	± 40%	70%	90%
Warga Terlatih (Keterampilan)	< 50 orang	300 orang	500 orang
Partisipasi Pemuda dlm Desa	< 20%	40%	60%
Panjang Jalan Desa Layak	56 km	70 km	80 km

TAHAPAN PETA JALAN PEMBANGUNAN

Tahap 1
Penguatan Fondasi (2023–2026)

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan pembangunan infrastruktur dasar awal (listrik dan internet 50% dusun).

Tahap 2
Pengembangan Ekonomi (2026–2030)

Fokus pada penguatan UMKM, optimalisasi BUMDes, dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan.

Tahap 3
Transformasi Ekonomi (2030–2035)

Fokus pada ekonomi digital, industri pengolahan lokal, dan pariwisata untuk mencapai kemandirian ekonomi desa sepenuhnya.

Resume ini disusun sebagai instrumen navigasi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa Tepian Langsung untuk mencapai visi desa mandiri dan berdaya saing pada tahun 2035.



Pendahuluan



1. Latar Belakang

Orang muda memiliki peran strategis sebagai generasi penerus sekaligus penggerak pembangunan desa. Keberadaan generasi muda yang aktif, kreatif, dan berdaya menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan desa di berbagai sektor, seperti pertanian, kewirausahaan, transmigrasi, dan pemanfaatan teknologi. Namun demikian, di banyak wilayah pedesaan, potensi generasi muda belum sepenuhnya terkelola secara optimal. Keterbatasan akses terhadap transmigrasi, lapangan kerja, serta ruang partisipasi dalam pembangunan desa mendorong sebagian pemuda memilih merantau ke kota, sementara pemuda yang tinggal di desa belum seluruhnya memperoleh kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal.

Di tingkat lokal, potensi orang muda di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sangat besar. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk muda berusia 15–29 tahun mencapai 12.334 jiwa atau sekitar 27,78 persen dari total penduduk¹. Potensi demografis ini merupakan modal penting bagi pembangunan, termasuk di tingkat desa. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di wilayah pedesaan, yang memerlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Tepian Langsung. Berdasarkan observasi lapangan serta analisis data-data kuantitatif dan kualitatif, tingkat partisipasi generasi muda dalam kegiatan pembangunan desa masih rendah. Orang muda lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan rekreasi seperti

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur, “Kecamatan Bengalon Dalam Angka 2025” <https://kutimkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/d8a63fc503f19145aa4e3c35/kecamatan-bengalon-dalam-angka-2025.html>.

hiburan dan olahraga, sementara peran dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain terbatasnya ruang ekspresi dan pengembangan kapasitas pemuda, belum optimalnya peran organisasi kepemudaan, serta dinamika sosial yang beragam di tengah masyarakat desa yang transmigran.

Desa Tepian Langsung dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam, termasuk masyarakat asli/lokal, pendatang, dan transmigran, yang masing-masing menghadapi tantangan dan kebutuhan berbeda. Persoalan akses infrastruktur, layanan dasar, dan administrasi turut memengaruhi tingkat partisipasi dan rasa memiliki warga, termasuk generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan aspirasi mereka sebagai dasar untuk merumuskan strategi dan rekomendasi program yang mampu mendorong keterlibatan generasi muda secara inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa Tepian Langsung.

2. Tujuan dan Hasil Penelitian

2.1. Tujuan Penelitian

- 2.1.1. Mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan pemuda di desa;
- 2.1.2. Mengetahui minat, bakat, dan potensi yang dimiliki pemuda desa;
- 2.1.3. Menggali pandangan dan harapan pemuda terhadap pembangunan maupun pelibatan dalam pelaksanaan program di desa;
- 2.1.4. Memberikan rekomendasi program atau kegiatan yang bisa mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.

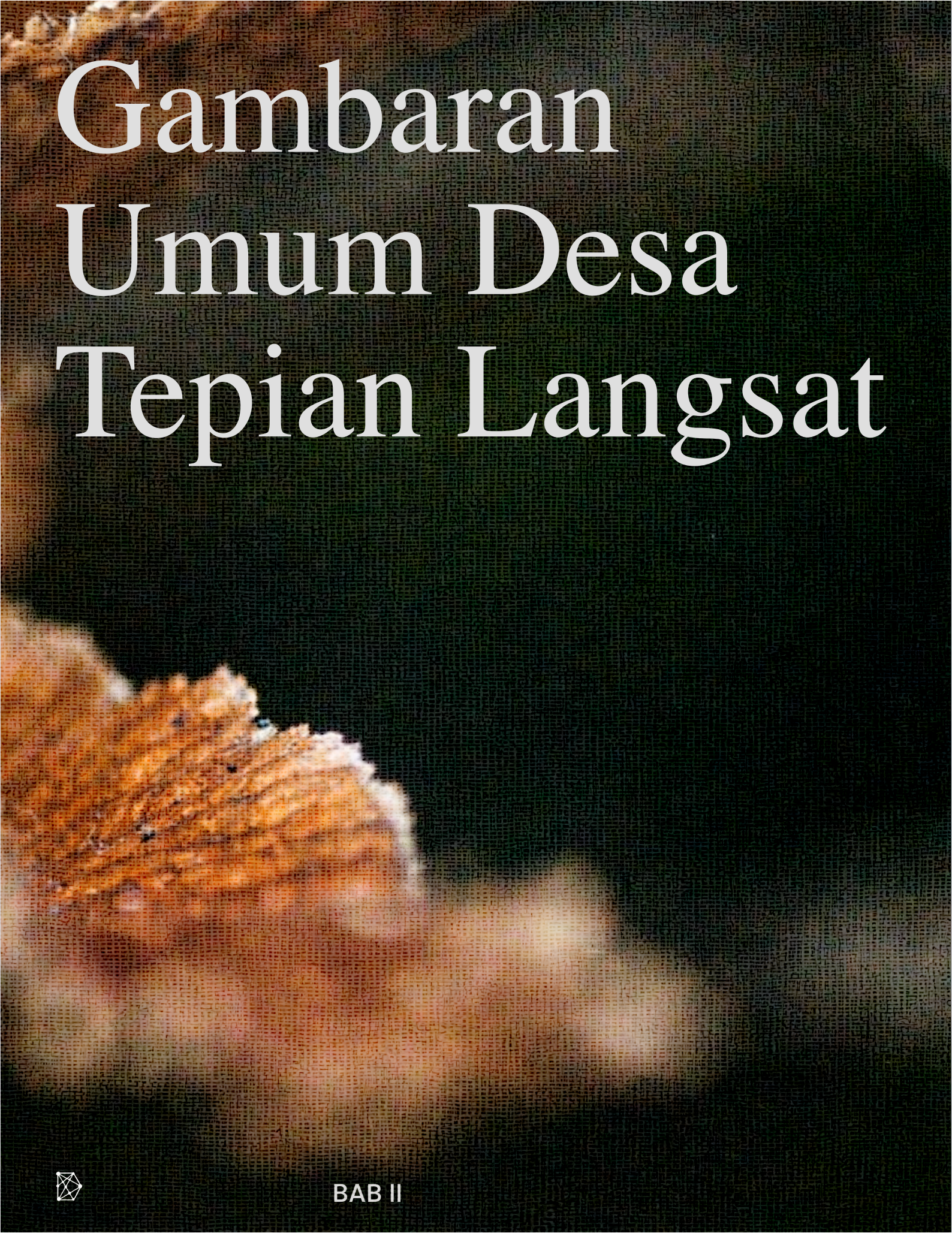


2.2. Hasil Penelitian

- 2.2.1. Laporan penelitian tentang kondisi dan potensi pemuda desa;
- 2.2.2. Data dan informasi yang bisa menjadi dasar kebijakan desa;
- 2.2.3. Rekomendasi program atau kegiatan kepemudaan;
- 2.2.4. Diseminasi hasil penelitian kepada pemerintah desa dan masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, terutama di tiga dusun inti berbasis data primer.



Gambaran Umum Desa Tepian Langsung



1. Demografi

Berdasarkan dokumen RPJMDes Desa Tepian Langsung tahun 2023, kondisi demografi dan profil sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1.1. Komposisi Penduduk dan Keluarga

Total penduduk Desa Tepian Langsung tercatat sebanyak 3.674 jiwa, yang terdiri dari 2.045 laki-laki dan 1.629 perempuan. Adapun jumlah total keluarga tercatat sebanyak 1.161 keluarga.

1.2. Struktur Mata Pencaharian

Sumber penghasilan penduduk Desa Tepian Langsung tersebar di berbagai sektor, dengan rincian jumlah sebagai berikut:

Sektor	Jumlah (Orang)
Jasa	550
Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	250
Perdagangan/Eceran dan Rumah Makan	200
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	180
Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, dll)	150
Pertambangan dan Penggalian	15

1.3. Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja

Karakteristik tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
Lulusan SD	642
Tidak tamat SD/Tidak sekolah	254
Lulusan SMP	241
Lulusan SMA	221
Lulusan S1 ke atas	31

2. Potensi Desa

Potensi Desa Tepian Langsung mencakup berbagai aspek sumber daya yang menjadi modal dasar pembangunan desa, yang terbagi ke dalam kategori sebagai berikut:

2.1. Sumber Daya Alam (SDA)

- Desa Tepian Langsung memiliki kekayaan alam yang tersebar di empat dusun (Dusun I, II, III, dan IV) yang secara umum merupakan milik masyarakat. Potensi tersebut meliputi:
- a. Potensi Material dan Hutan: Tersedianya cadangan

- batu, pasir, kayu, dan kawasan hutan yang merata di seluruh dusun.
- b. Potensi Perkebunan: Adanya tanaman perkebunan sawit yang dikelola oleh masyarakat dan industri di seluruh wilayah dusun.
- c. Potensi Air dan Lingkungan: Keberadaan sungai di seluruh dusun, mata air (Dusun I dan IV), serta keberadaan danau, gunung, dan goa karst yang spesifik berada di wilayah Dusun I.
- d. Potensi Pariwisata Alam: Terdapat objek wisata alam berupa air terjun yang terletak di Dusun I dan Dusun III.

- 2.2. Sumber Daya Fisik dan Prasarana
- Dukungan infrastruktur di Desa Tepian Langsung mencakup beberapa aset penting:
- a. Prasarana Umum: Tersedianya akses jalan sepanjang 56.409 Km, 1 unit jembatan, dan 1 unit dermaga wisata.
 - b. Prasarana Pendidikan: Terdapat 7 unit Gedung PAUD, 7 unit Gedung TK, 3 unit gedung SD, serta 5 unit Taman Bacaan Al-Quran.
 - c. Prasarana Kesehatan: Tersedia 10

unit Posyandu, 3 unit Pusban, 1 unit Polindes, 3 unit sarana air bersih, serta 45 unit MCK.

- 2.3. Potensi Kelembagaan dan Ekonomi Desa
- Potensi ekonomi di Desa Tepian Langsung didukung oleh keberadaan lembaga masyarakat dan aset produktif sebagai berikut:
- a. Kelembagaan Ekonomi Masyarakat: Terdiri dari 39 kelompok usaha tani dan 4 kelompok usaha yang masuk kategori sehat.
 - b. Desa memiliki 4 unit aset produktif berupa modal.

- 2.4. Sumber Daya Sosial Budaya
- Kekuatan sosial kemasyarakatan di Desa Tepian Langsung terjaga melalui berbagai aktivitas yang rutin dilaksanakan di seluruh RT yang ada, meliputi:
- a. Pelaksanaan kerja bakti rutin tingkat RT.
 - b. Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
 - c. Upaya pelestarian kearifan lokal yang dilakukan secara menyeluruh di tingkat RT.



Temuan dan Pembahasan



1. Profil Responden

Secara administratif, Desa Tepian Langsung pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.674 jiwa. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari 2.045 laki-laki dan 1.629 perempuan, dengan total sebanyak 1.161 kepala keluarga. Untuk mendapatkan kondisi yang mendalam mengenai profil Desa Tepian Langsung, studi kami melibatkan 90 orang responden yang diambil dari tiga wilayah dusun dengan karakteristik sosial yang berbeda.

Distribusi responden dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah, yaitu Dusun 1 sebanyak 48 orang, Dusun 2 sebanyak 26 orang, dan Dusun 3 sebanyak 16 orang. Pemilihan ketiga lokasi ini didasarkan pada keberagaman latar belakang etnis dan pola pemukiman yang mendominasi Desa Tepian Langsung.

Dusun 1 merupakan pemukiman mayoritas suku Kutai sebagai penduduk asli, Dusun 2 didominasi oleh warga pendatang yang bermukim di sepanjang jalan raya, sedangkan Dusun 3 adalah area transmigrasi yang mayoritas dihuni oleh suku Jawa. Melalui

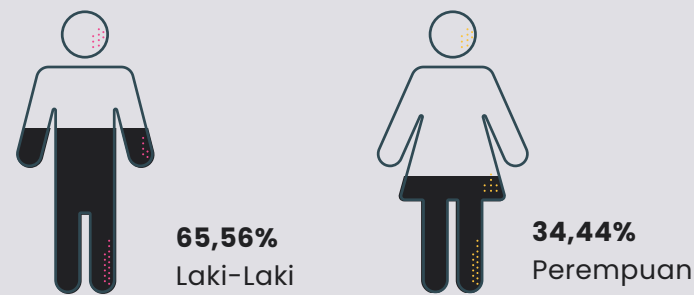
GRAFIK 3.1 JUMLAH RESPONDEN



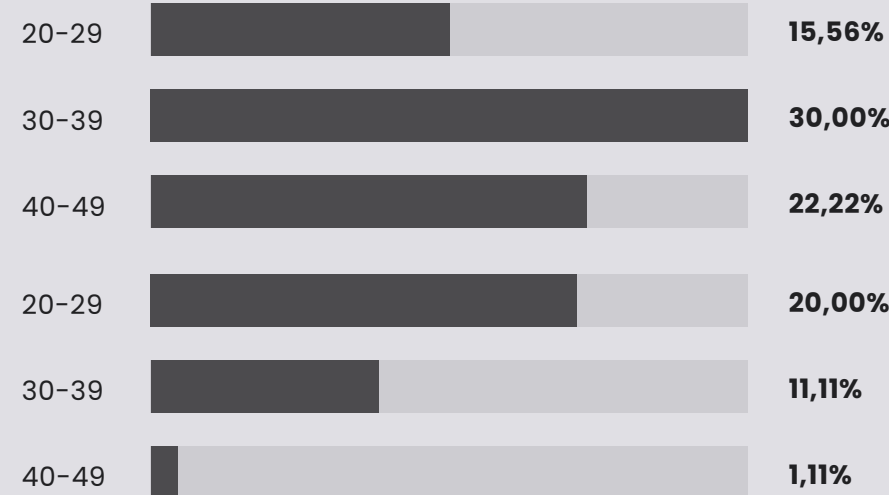
pembagian ini, data yang terkumpul diharapkan mampu mewakili realitas sosial dari berbagai latar belakang suku dan asal-usul penduduk yang ada di Desa Tepian Langsung.

Profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi laki-laki sebesar 65,56%, sementara perempuan mencakup 34,44%. Dari sisi usia, sebagian besar responden berada pada masa produktif dengan kelompok umur 30–39 tahun sebagai populasi terbesar mencapai 30%. Selanjutnya diikuti oleh kelom-

GRAFIK 3. 2 JENIS KELAMIN RESPONDEN
→



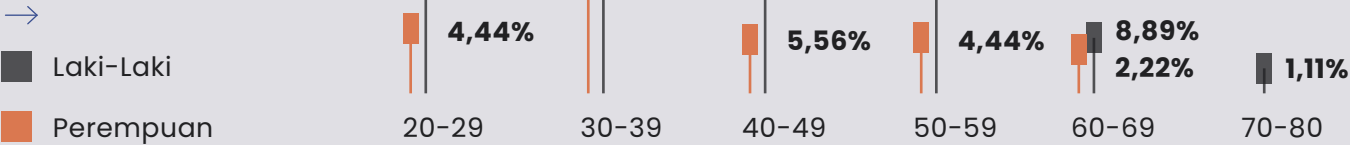
GRAFIK 3. 3 KELOMPOK USIA RESPONDEN
→



pok usia 40–49 tahun (22,22%), usia 50–59 tahun (20%), serta usia muda 20–29 tahun (15,56%). Sisanya merupakan kelompok usia lanjut pada rentang 60–69 tahun (11,11%) dan 70–80 tahun (1,11%).

Jika dibedah berdasarkan jenis kelamin di tiap rentang usia, terdapat pola distribusi yang berbeda. Pada kelompok usia muda 20–29 tahun, proporsi laki-laki (11,11%) lebih besar dibandingkan perempuan (4,44%). Kondisi ini berbalik pada rentang 30–39 tahun, di mana responden perempuan justru lebih banyak yakni 17,78% dibandingkan laki-laki yang sebesar 12,22%. Namun, pada kelompok usia yang lebih tua, proporsi laki-laki kembali mendominasi secara signifikan. Hal ini terlihat pada rentang 40–49 tahun (16,67% laki-laki dan 5,56% perempuan), usia 50–59 ta-

GRAFIK 3. 4 KELOMPOK USIA RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



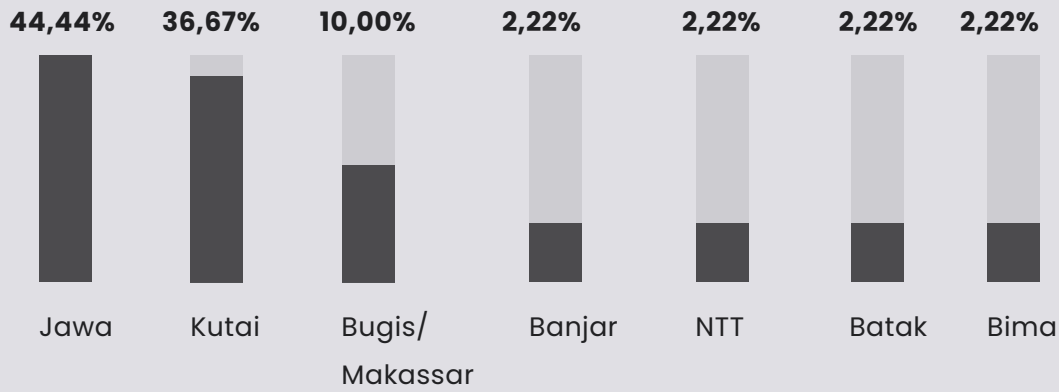
hun (15,56% laki-laki dan 4,44% perempuan), hingga usia 60–69 tahun (8,89% laki-laki dan 2,22% perempuan). Sementara untuk kelompok usia tertinggi, 70–80 tahun, seluruhnya merupakan responden laki-laki (1,11%). Sebaran ini menunjukkan bahwa komposisi responden dalam studi ini mayoritas merupakan laki-laki pada rentang usia matang hingga usia lanjut, sementara responden perempuan lebih banyak terwakili pada kelompok usia kepala tiga.

Keberagaman latar belakang etnis responden mencerminkan Desa Tepian Langsung sebagai wilayah yang multikultural. Suku Jawa menjadi kelompok terbesar dengan persentase mencapai 44,44%, disusul oleh suku Kutai sebesar 36,67%. Selain kedua ke-

lompok tersebut, terdapat pula warga yang berasal dari suku Bugis/Makassar (10%), serta kelompok etnis lain meliputi suku Banjar, NTT, Batak, dan Bima yang masing-masing berjumlah 2,22%. Besarnya populasi suku Jawa berkaitan erat dengan program transmigrasi, di mana rata-rata mereka mulai datang dan menetap di Desa Tepian Langsung pada rentang periode tahun 2008 hingga 2010. Komposisi ini menunjukkan adanya percampuran antara penduduk asli dengan masyarakat pendatang dari berbagai wilayah yang kemudian membentuk struktur sosial di Desa Tepian Langsung saat ini.

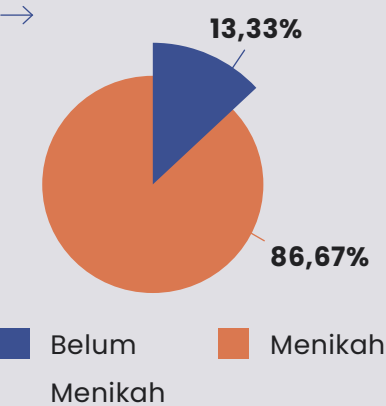
Ditinjau dari status pernikahan, sebagian besar responden dalam studi ini merupakan penduduk yang sudah menikah, yakni

GRAFIK 3. 5 ASAL SUKU RESPONDEN
→



GRAFIK 3. 5 ASAL SUKU RESPONDEN

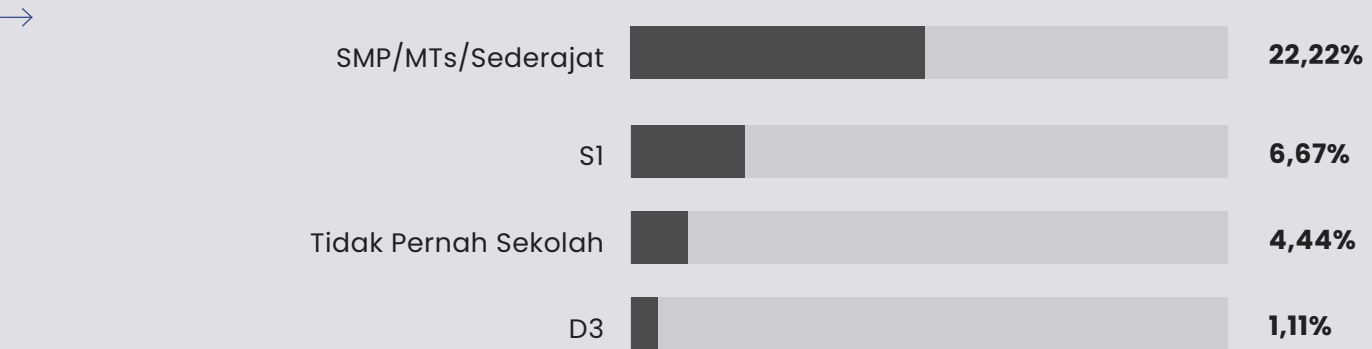
GRAFIK 3. 6 STATUS
PERNIKAHAN RESPONDEN



sebesar 86,67%, sementara sisanya sebesar 13,33% berstatus belum menikah. Hal yang menarik ditemukan pada kelompok responden yang belum menikah, di mana mereka rata-rata telah memiliki penghasilan mandiri yang cukup stabil. Penghasilan tersebut umumnya bersumber dari jatah rutin pembagian plasma, baik atas nama orang tua maupun atas nama anak itu sendiri, dengan nilai berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah setiap bulannya. Besaran nominal ini sangat bergantung pada tingkat "ketokahan" atau pengaruh personal seseorang sebagai figur yang dituakan, seperti ketua adat atau tokoh masyarakat lainnya. Selain dari hasil plasma, sebagian responden yang belum menikah ini juga diketahui sudah aktif bekerja dan memiliki penghasilan mandiri dari sektor lain di sekitar wilayah desa.

Latar belakang pendidikan responden di Desa Tepian Langsat didominasi oleh lulusan tingkat dasar dan menengah. Persentase terbesar adalah lulusan SD atau sederajat sebesar 41,11%, diikuti oleh lulusan SMU/MA/SMK atau sederajat sebesar 24,44%, dan SMP/MTs atau sederajat sebanyak 22,22%. Sementara itu,

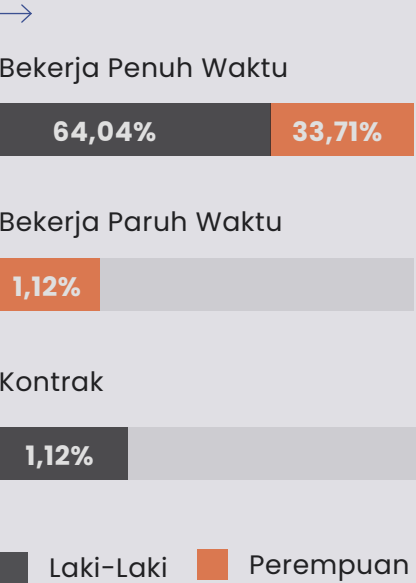
GRAFIK 3. 7
STATUS
PENDIDIKAN
RESPONDEN



GRAFIK 3. 8 STATUS BEKERJA
RESPONDEN



GRAFIK 3. 9 STATUS BEKERJA
RESPONDEN



responden dengan latar belakang pendidikan tinggi mencakup lulusan S1 sebesar 6,67% dan D3 sebesar 1,11%. Adapun responden yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah tercatat sebanyak 4,44%. Dominasi lulusan tingkat sekolah dasar ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan urgensi pendidikan tinggi di masa lampau, di mana pencapaian pendidikan belum dianggap sebagai target utama dalam hidup. Hal ini ditengarai berkaitan dengan adanya stabilitas ekonomi dari jatah rutin pembagian plasma yang membuat dorongan untuk meningkatkan kapasitas melalui jalur formal menjadi kurang mendesak.

Selain faktor tersebut, kendala geografis yang terpencil dan keterbatasan akses sekolah yang masih berstatus filial menuntut perjuangan ekstra bagi warga yang ingin menempuh pendidikan lebih layak. Menariknya, terdapat perbedaan kecenderungan pada kelompok masyarakat pendatang, seperti etnis Bugis, yang justru memiliki kesadaran pendidikan lebih tinggi. Bagi kelompok pendatang, peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dipandang sebagai instrumen krusial untuk bertahan hidup dan beradaptasi di wilayah baru.

Terkait aktivitas ekonomi, mayoritas responden saat ini berada dalam status bekerja, yang terdiri dari 62,22% laki-laki dan 26,67% perempuan. Untuk responden yang sudah tidak bekerja lagi atau pensiun, persentasenya masing-masing sebesar 1,11% baik pada laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, kelompok yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang menganggur tercatat sebesar 2,22% pada laki-laki dan 6,67% pada perempuan. Angka pengangguran yang lebih tinggi pada kelompok perempuan cenderung dipengaruhi oleh kuatnya peran di sektor domestik, di mana sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengurus rumah tangga.

Meski demikian, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi biasanya melalui pengelolaan UMKM seperti toko kelontong atau usaha makanan, serta membantu suami di sektor perkebunan pada waktu-waktu tertentu. Di sisi lain, pekerjaan laki-laki



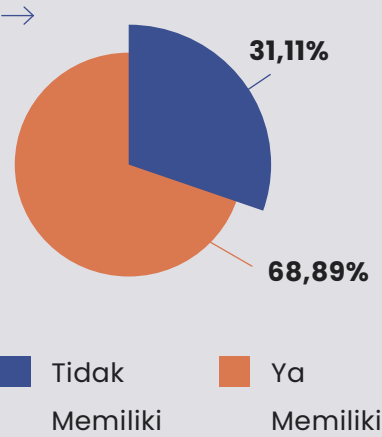
menunjukkan pola yang lebih fleksibel; selain mengelola kebun sawit sebagai mata pencaharian utama, mereka juga cenderung mengambil pekerjaan serabutan untuk mengisi waktu di luar jadwal rutin perawatan kebun.

Ditinjau dari status waktu kerja, sebagian besar responden bekerja secara penuh waktu (full-time), yakni laki-laki sebesar 64,04% dan perempuan sebesar 33,71%. Selebihnya, terdapat responden yang bekerja dengan status kontrak sebesar 1,12% (hanya laki-laki) dan bekerja paruh waktu (part-time) sebesar 1,12% (hanya perempuan). Sebaran data ini memberikan Gambaran mengenai kapasitas pendidikan dan keterlibatan kerja penduduk di lokasi studi. Secara pola harian, baik pekerja di sektor formal maupun informal rata-rata memulai aktivitas mereka sejak pukul 6 atau 7 pagi dan baru berakhir pada sore hari menjelang waktu asar. Ritme kerja yang padat ini membuat ruang interaksi sosial warga menjadi cukup terbatas pada jam-jam produktif. Waktu bagi warga untuk berkumpul dan berinteraksi biasanya baru tercipta pada sore hari setelah jam kerja usai, yang sering kali berpusat pada aktivitas olahraga bersama seperti kegiatan voli.

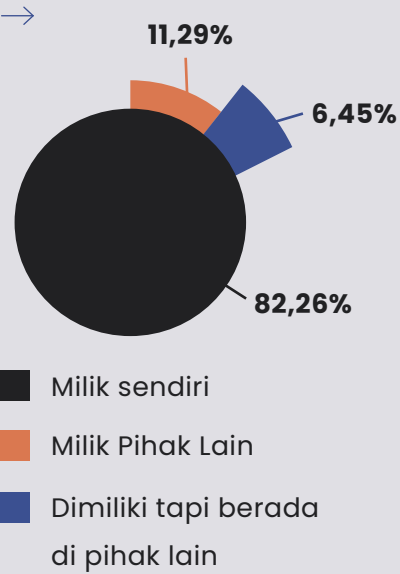
2. Kondisi Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Warga Desa

Desa Tepian Langsung memiliki luas wilayah administratif yang sangat luas, yakni mencapai 205.329 Ha. Dari total luasan tersebut, sektor perkebunan menjadi pilar utama penggunaan lahan dengan sekitar 64.200 Ha (31,27%) telah dikembangkan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Besarnya proporsi lahan sawit ini selaras dengan temuan studi yang mengonfirmasi tingginya akses masyarakat terhadap sumber daya lahan, di mana 68,89% masyarakat Desa Tepian Langsung tercatat memiliki lahan. Kondisi penguasaan lahan saat ini merupakan titik balik dari pergeseran panjang aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Tepian Langsung. Secara historis, orientasi ekonomi warga telah

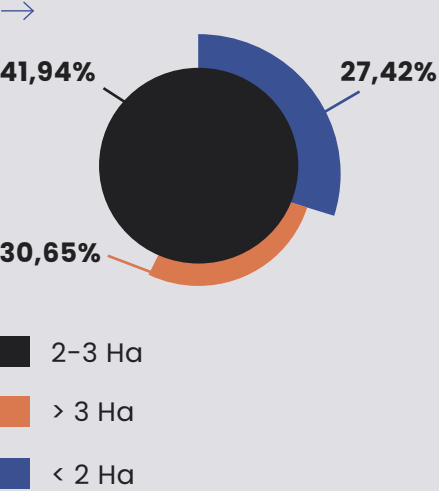
GRAFIK 3. 10 KEPEMILIKAN LAHAN



GRAFIK 3. 11 STATUS KEPEMILIKAN LAHAN



GRAFIK 3. 12 LUAS LAHAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN



mengalami beberapa kali transformasi, yang dimulai dari sektor logging (perkayuan), kemudian beralih ke sektor pertambangan, hingga akhirnya kini bertumpu pada perkebunan kelapa sawit. Pergeseran ini tidak hanya mengubah lanskap penggunaan lahan, tetapi juga mereformasi struktur pendapatan warga yang kini mayoritas bergantung pada sistem kemitraan plasma serta pengelolaan perkebunan rakyat.

Struktur kepemilikan lahan di Desa Tepian Langsung didominasi oleh kepemilikan pribadi yang kuat, dengan 82,26% lahan berstatus milik sendiri. Sementara itu, pemanfaatan lahan lainnya mencakup lahan yang dikelola melalui pihak lain (seperti disewakan) sebesar 11,29%, serta 6,45% yang dikelola melalui skema milik pihak lain atau pola kemitraan plasma sawit.

Jika ditinjau dari skala penguasaannya, distribusi luasan lahan yang dimiliki masyarakat cukup bervariasi namun tetap terkonsentrasi pada skala usaha produktif. Mayoritas pemilik lahan, yakni sebesar 41,94%, menguasai lahan dengan luas antara 2 hingga 3 Ha. Selanjutnya, sebesar 30,65% masyarakat memiliki lahan dengan kategori luas yaitu di atas 3 Ha, dan sisanya sebesar 27,42% memiliki lahan dengan luasan di bawah 2 Ha. Dalam konteks kesejahteraan, kepemilikan lahan pada kisaran 2 hingga 3 Ha tersebut dinilai sudah sangat mencukupi untuk menopang taraf hidup warga secara layak. Dengan hasil dari luasan lahan tersebut, kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat rata-rata telah terpenuhi dengan baik, sehingga kepemilikan aset ini menjadi indikator kuat bagi stabilitas ekonomi rumah tangga di Desa Tepian Langsung.

Kepemilikan lahan terbukti menjadi determinan kunci kesejahteraan warga di Desa Tepian Langsung. Hal ini terlihat dari tingginya persepsi positif pada kelompok pemilik lahan, di mana 64,44% responden merasa sejahtera dan hanya sebagian kecil (4,44%) yang merasa sebaliknya. Sebagai perbandingan, di kelompok masyarakat yang tidak memiliki lahan, tingkat kesejahteraan yang dirasakan jauh lebih rendah, yakni hanya sebesar 26,67%.



Meskipun demikian, angka ketidaksejahteraan pada kedua kelompok tetap konsisten berada di angka 4,44%, yang mengindikasikan adanya faktor ekonomi lain yang menopang kehidupan mereka di luar kepemilikan aset tanah.

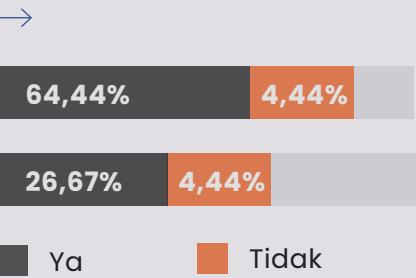
Rendahnya angka ketidaksejahteraan pada kelompok non-pemilik lahan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh daya serap tenaga kerja di sektor perkebunan. Meskipun kepemilikan lahan merupakan aset ideal untuk mencapai kesejahteraan maksimal, keberadaan sektor perkebunan di Desa Tepian Langsung berfungsi sebagai jaring pengaman bagi warga tanpa lahan. Integrasi mereka ke dalam pasar tenaga kerja sawit, yang dipadukan dengan peluang di sektor lainnya, mencegah kelompok non-pemilik lahan terperosok ke dalam kategori tidak sejahtera.

Fenomena ini sejalan dengan analisis Bou Dib dkk (2018), yang menyatakan bahwa ekspansi kelapa sawit memberikan efek rembesan (spillover) ekonomi bagi rumah tangga non-pertanian melalui pasar tenaga kerja. Bagi warga tanpa tanah, bekerja sebagai buruh atau terlibat dalam rantai jasa perkebunan menjadi alternatif yang lebih menguntungkan dibandingkan sektor tradisional seperti karet ². Dengan demikian, manfaat ekonomi kelapa sawit tidak hanya terkonsentrasi pada penguasaan aset, tetapi juga pada distribusi peluang kerja yang tercipta di sekitarnya.

Kondisi kesejahteraan di Desa Tepian Langsung berkaitan erat dengan struktur mata pencaharian masyarakatnya yang didominasi oleh sektor perkebunan. Berdasarkan data lapangan, sektor perkebunan—baik dikelola secara swadaya maupun melalui sistem plasma—menjadi tumpuan utama bagi 45,6% warga. Posisi ini disusul oleh sektor formal atau penerima gaji sebesar

2 Jonida Bou Dib, dkk., “Land-Use Change and Livelihood of non-farm Households: The Role of Income from Employment in Oil Palm and Rubber in Rural Indonesia,” Land Use Policy (2018).

GRAFIK 3. 13 PENILAIAN KESEJAHTERAAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH



41,1%, sementara sektor jasa, pertanian pangan, dan perdagangan berada pada angka yang lebih rendah di bawah 15%.

Dominasi sektor perkebunan sebagai motor penggerak ekonomi warga ini menunjukkan bahwa komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga petani lokal ³. Temuan di lapangan membantah anggapan bahwa ekspansi perkebunan hanya menguntungkan korporasi besar; bagi warga di tingkat akar rumput, komoditas ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan taraf hidup dan daya beli rumah tangga.

Salah satu temuan menarik di Desa Tepian Langsung adalah kuatnya strategi diversifikasi pendapatan di kalangan warga. Tercatat sebanyak 31,11% masyarakat memiliki dua sumber penghasilan, dan 6,67% lainnya bahkan memiliki lebih dari dua sumber pendapatan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui karakteristik kelapa sawit yang memiliki kebutuhan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan tanaman alternatif lainnya ⁴. Rendahnya intensitas waktu yang diperlukan untuk mengelola kebun menciptakan peluang bagi petani untuk mengalokasikan sisa waktu mereka ke aktivitas ekonomi lain. Lebih lanjut, potret kesejahteraan ini tercermin dalam profil pendapatan dan pengeluaran warga. Secara umum, pendapatan masyarakat didominasi pada rentang Rp5–10 juta (38,89%), diikuti rentang Rp3–5 juta (24,44%), di atas Rp10 juta (23,33%), dan di bawah Rp3 juta (13,33%). Sementara itu, pola pengeluaran menunjukkan distribusi pada rentang Rp5–10 juta (35,56%), Rp3–5 juta (28,89%), serta kelompok di atas Rp10 juta dan di bawah Rp3 juta yang masing-masing berada pada angka 17,78%.

3 Christoph Kubitza, dkk., “The Economics Behind an Ecological Crisis: Livelihood Effects of Oil Palm Expansion in Sumatra, Indonesia,” Human Ecology (2018).

4 Ibid



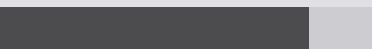
GRAFIK 3. 14
JENIS SUMBER
PENGHASILAN



GRAFIK 3. 15 JUMLAH SUMBER
PENGHASILAN



1 Sumber Penghasilan **62,22 %**



2 Sumber Penghasilan **31,11 %**



Lebih dari 2
Sumber Penghasilan **6,67 %**

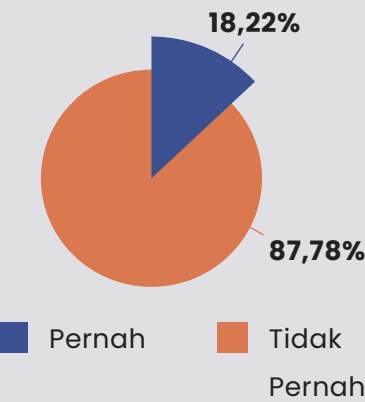


Data tersebut menunjukkan adanya celah (gap) ekonomi yang signifikan pada kelompok masyarakat kelas bawah. Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 tercatat sebesar Rp773.239 per kapita per bulan ⁵. Dengan asumsi rata-rata rumah tangga terdiri dari empat anggota keluarga, maka ambang batas minimum pendapatan agar tidak dikategorikan miskin mencapai Rp3.092.956. Artinya, warga yang berpendapatan di bawah Rp3 juta secara teknis berada di bawah standar kecukupan hidup minimal.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat jelas saat membandingkan angka pendapatan rendah (13,33%) dengan angka pengeluaran pada rentang yang sama (17,78%). Selisih tersebut menguatkan hipotesis bahwa kelompok masyarakat bersangkutan mengalami defisit anggaran, di mana biaya hidup melampaui pendapatan tetap yang diterima. Situasi sulit tersebut diperparah oleh minimnya akses terhadap jaring pengaman sosial, mengingat hanya 12,22% responden yang menerima bantuan perlindungan sosial dalam satu tahun terakhir. Meskipun menurut keterangan warga, program bantuan sosial yang bersifat rutin cenderung tidak pernah mereka rasakan dalam setahun

5 Badan Pusat Statistik (BPS), “Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota per Kapita per Bulan 2025” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njl0lzl=/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>.

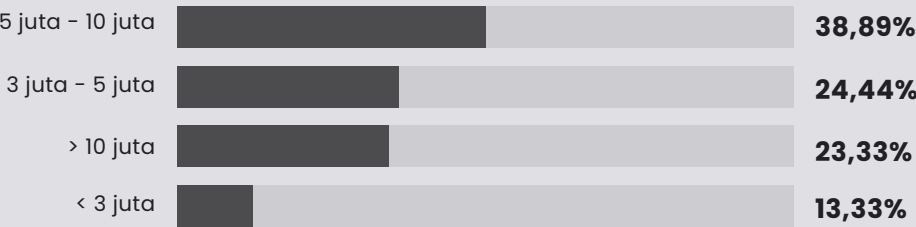
GRAFIK 3. 16 PENERIMAAN BANTUAN
SOSIAL DALAM SATU TAHUN
TERAKHIR



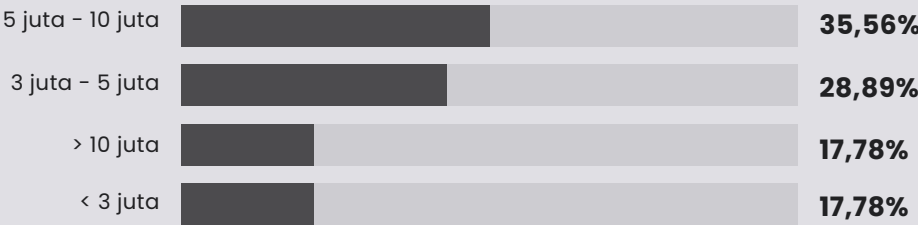
belakangan. Bantuan yang sempat diterima biasanya hanya bersifat insidental, seperti penyaluran bantuan dari pemerintah desa saat terjadi bencana banjir. Ketidadaan bantuan yang memadai memaksa warga bergantung pada mekanisme utang, bantuan pihak luar, atau menguras tabungan sekadar untuk menyambung kebutuhan pokok sehari-hari.

Sebaliknya, pada kelompok pendapatan menengah ke atas, terjadi kondisi surplus finansial yang memungkinkan adanya simpanan (saving). Kelompok ini memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan akumulasi modal, baik dalam bentuk tabungan masa depan maupun investasi kembali untuk peningkatan produktivitas lahan perkebunan. Pola distribusi ini mengisyaratkan bahwa stabilitas ekonomi rumah tangga di Desa Tepian Langsung sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga, terutama dalam mengatur selisih pendapatan terhadap biaya hidup. Kondisi ini memerlukan dukungan literasi keuangan yang baik, mengingat pendapatan yang tinggi sering kali dibarengi dengan kecenderungan peningkatan pola konsumsi yang ekspansif, seperti pembelian kendaraan atau barang elektronik. Tanpa pengelolaan yang bijak, pengeluaran konsumtif tersebut dapat menggerus pendapatan yang besar sekalipun. Oleh karena itu, kelompok pendapatan atas memiliki keleluasaan lebih besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi mereka melalui manajemen aset dan simpanan (saving) yang terencana. Struktur pengeluaran rumah tangga menun-

GRAFIK 3. 17 RATA-RATA
PENGHASILAN RUMAH
TANGGA PER BULAN



GRAFIK 3. 18 RATA-RATA
PENGELUARAN RUMAH
TANGGA PER BULAN

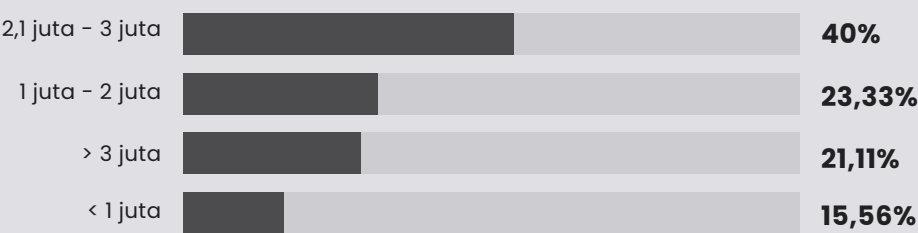


jukkan bahwa kebutuhan pangan menjadi prioritas utama dengan alokasi terbesar pada rentang Rp2–3 juta (40%). Untuk kebutuhan non-pangan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagian besar warga mengeluarkan di bawah Rp500 ribu (63,33%), meskipun terdapat kelompok kecil sebesar 6,67% yang mengeluarkan lebih dari Rp2 juta, yang kemungkinan berkaitan dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor atau genset. Pola pengeluaran rendah juga terlihat pada sektor komunikasi (92,22% di bawah Rp500 ribu) dan transportasi secara umum (72,22% di bawah Rp1 juta). Namun, sektor pendidikan tetap menjadi pengecualian yang menarik; meski mayoritas berada di bawah Rp1 juta, terdapat 12,90% warga yang mengalokasikan biaya pendidikan di atas Rp2 juta per bulan. Tingginya angka pada sektor pendidikan ini mengindikasikan adanya prioritas investasi sumber daya manusia yang besar bagi sebagian keluarga, guna membiayai pendidikan lanjutan di luar wilayah desa sebagai strategi peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Prioritas anggaran rumah tangga untuk pendidikan ini sejalan dengan temuan Chrisendo dkk (2022) dalam studinya yang menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam budidaya kelapa sawit berkontribusi signifikan terhadap peningkatan standar hidup, di mana dampak pada sektor pendidikan tercatat paling besar. Secara spesifik, pendapatan dari sektor sawit mampu meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan anak hingga lebih dari 30%, bahkan untuk jenjang pendidikan tinggi peningkatannya mencapai hampir 40% ⁶. Sebagai penutup, Grafikan subjektif

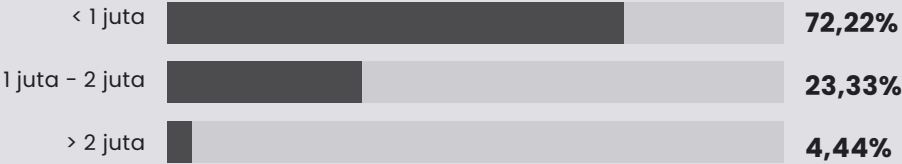
6 Daniel Chrisendo, dkk., “Oil Palm Cultivation Improves Living Standards and Human Capital Formation in Smallholder Farm Households,” World Development 159 (2022).



GRAFIK 3. 19 RATA-RATA
PENGELUARAN RUMAH TANGGA
PER BULAN UNTUK PANGAN



GRAFIK 3. 20 RATA-RATA
PENGELUARAN RUMAH TANGGA
PER BULAN UNTUK TRANSPORTASI



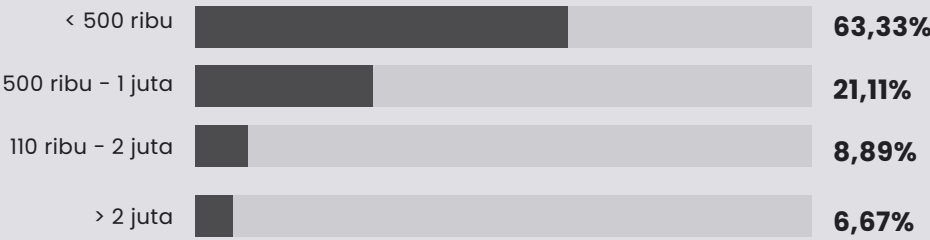
GRAFIK 3. 21 RATA-RATA
PENGELUARAN RUMAH TANGGA
PER BULAN UNTUK PENDIDIKAN



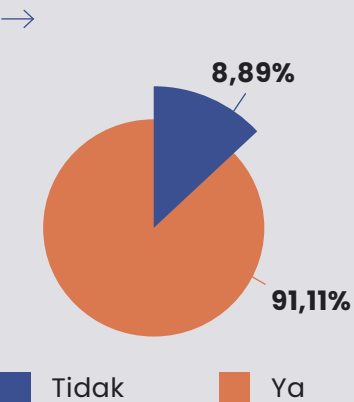
GRAFIK 3. 22 RATA-RATA
PENGELUARAN RUMAH TANGGA
PER BULAN UNTUK KOMUNIKASI



GRAFIK 3. 23 RATA-RATA PENGELUARAN
RUMAH TANGGA PER BULAN UNTUK
BBM (TERMASUK MEMASAK)



GRAFIK 3. 24 PENILAIAN RUMAH TANGGA TERHADAP KESEJAHTERAAN



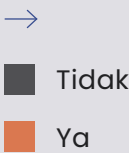
mengenai kesejahteraan di Desa Tepian Langsung menunjukkan angka yang sangat positif, di mana 91,11% keluarga menyatakan diri mereka sejahtera, sementara hanya 8,89% yang merasa sebaliknya. Standar kesejahteraan di mata warga secara umum diukur dari terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari. Menariknya, tidak ditemukan perbedaan standar yang mencolok antara penduduk asli maupun warga pendatang. Bagi masyarakat Jawa di sana, bekerja dan mampu makan saja sudah dianggap sebagai bentuk kesejahteraan, yang tercermin dalam ungkapan "lek kowe ndek Kalimantan ora iso mangan, kebangeten, arti-ne kowe males" (kalau kamu di Kalimantan sampai tidak bisa makan, itu keterlaluhan, artinya kamu malas). Ada pula kecenderungan warga merasa malu jika dianggap tidak mampu, sehingga mereka lebih bangga apabila dinilai cukup sejahtera.

Di sisi lain, bagi 8,89% yang merasa tidak sejahtera, hal tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh status tempat tinggal yang masih sewa atau kontrak, serta besarnya pengeluaran bulanan yang membuat mereka tidak memiliki sisa uang untuk ditabung. Kondisi ini diperparah oleh perasaan "pas-pasan" akibat tidak mendapatkan jatah plasma sawit, serta tingginya biaya hidup karena mahalnya harga barang dan jauhnya akses logistik ke pusat kecamatan atau kabupaten. Faktor-faktor inilah yang menjadi beban tambahan yang menggerus tingkat kesejahteraan bagi sebagian kecil warga tersebut.

Menariknya, penilaian kesejahteraan ini tidak selalu berjalan linier dengan jumlah pendapatan materi. Secara statistik, seluruh responden dengan pendapatan di bawah Rp3 juta justru merasa sejahtera. Kelompok ini merasa hidup mereka cukup karena menganggap mencari nafkah di Desa Tepian Langsung jauh lebih mudah dibandingkan di daerah Jawa. Sebaliknya, perasaan tidak sejahtera justru muncul di kelompok pendapatan yang lebih tinggi; tercatat 1,11% warga berpendapatan di atas Rp10 juta, 18,89% warga di rentang Rp3–5 juta, serta 2,22% di rentang Rp5–10 juta menyatakan diri mereka tidak sejahtera.



GRAFIK 3. 25 PENILAIAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN KELOMPOK PENDAPATAN



Fenomena ini menunjukkan bahwa di Desa Tepian Langsung, kesejahteraan bukan sekadar angka di atas kertas. Bagi kelompok pendapatan rendah, rasa sejahtera lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses nafkah. Sementara bagi kelompok pendapatan menengah ke atas, ketidakpuasan ekonomi kemungkinan besar dipicu oleh tingginya ekspektasi hidup, beban pengeluaran yang besar, atau belum terpenuhinya aset maupun kebutuhan jangka panjang seperti rumah, biaya pendidikan lanjut anak, dan lain sebagainya.

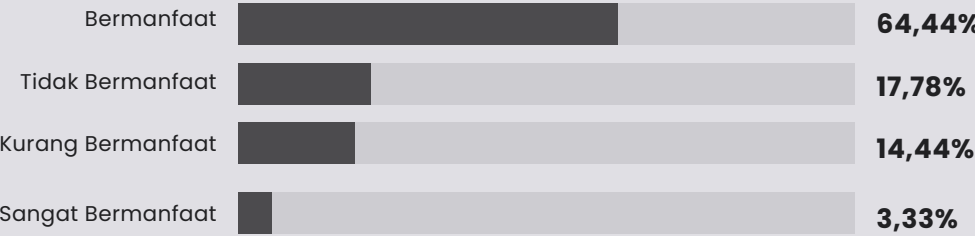
3. Penilaian Kegiatan Desa oleh Orang Muda

Penilaian responden terhadap aktivitas generasi muda di Desa Tepian Langsung menunjukkan kecenderungan yang positif. Mayoritas responden menganggap kegiatan pemuda di desa tersebut bermanfaat, dengan rincian 64,44% menilai bermanfaat dan 3,33% menilai sangat bermanfaat. Di sisi lain, terdapat 17,78% responden yang menganggap kegiatan pemuda tidak bermanfaat, sementara 14,44% lainnya menilai kurang bermanfaat.

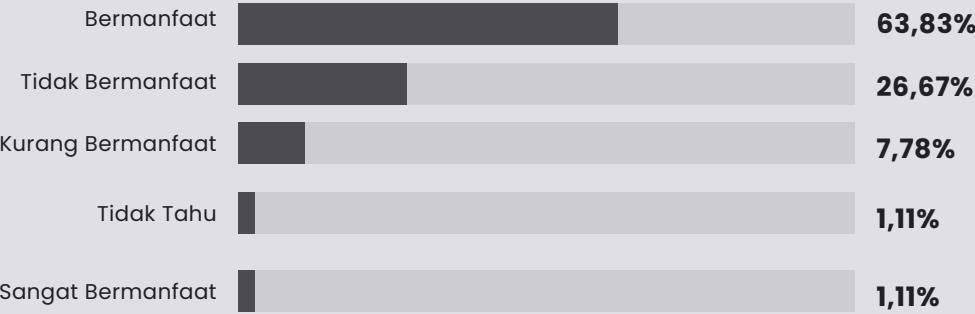
Pola penilaian yang serupa juga terlihat pada kegiatan pemuda. Sebanyak 63,33% responden menilai kegiatan mereka bermanfaat dan 1,11% menganggap sangat bermanfaat. Namun, angka responden yang menilai kegiatan pemuda tidak bermanfaat mencapai 26,67%, atau lebih tinggi dibandingkan penilaian terhadap kelompok pemuda. Sisanya, sebanyak 7,78% menilai kurang bermanfaat dan 1,11% menyatakan tidak memiliki informasi atau tidak tahu terkait hal tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar warga memandang kegiatan pemuda dan pemuda sebagai hal yang positif, masih terdapat persentase yang cukup signifikan—terutama pada kelompok pemuda—yang menilai aktivitas tersebut belum memberikan dampak atau kegunaan yang nyata bagi masyarakat desa

GRAFIK 3. 26 PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP KEGIATAN PEMUDA

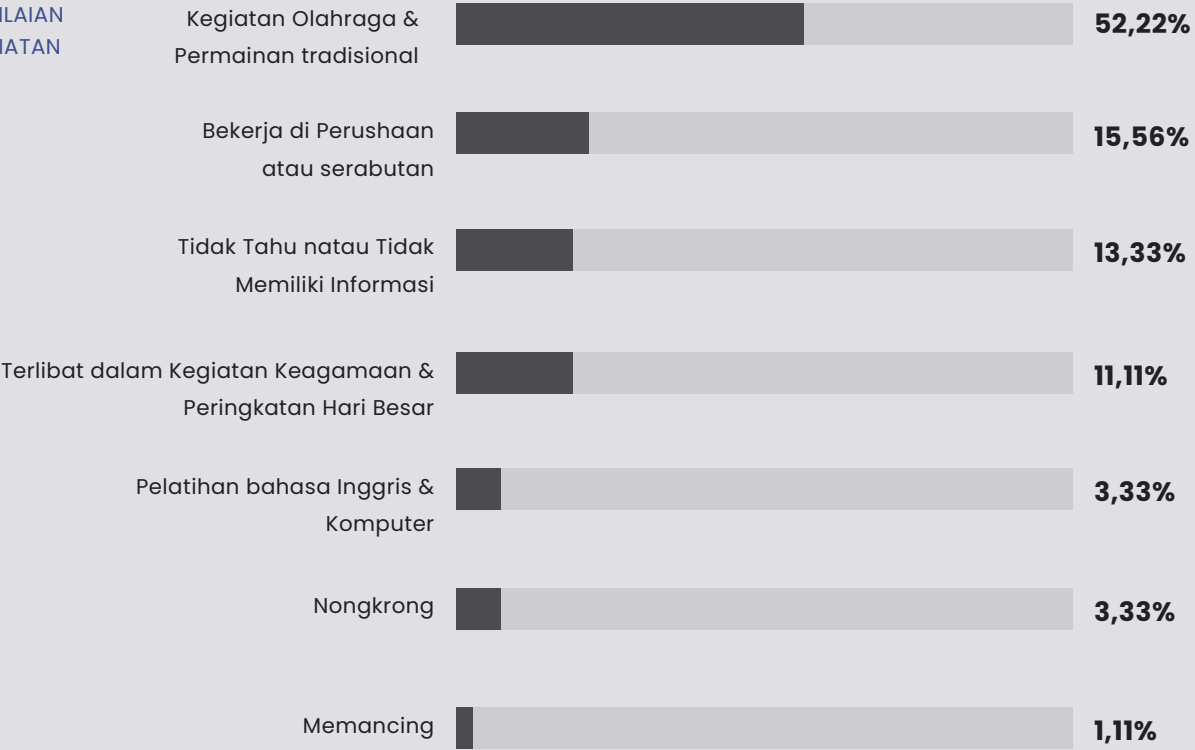


GRAFIK 3. 27 PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP KEGIATAN PEMUDI



Melihat sebaran aktivitasnya, kegiatan pemuda di Desa Tepian Langsung didominasi oleh olahraga dan permainan tradisional (52,22%), sementara sebagian lainnya fokus pada pekerjaan di perusahaan atau serabutan (15,56%), serta keterlibatan dalam kegiatan keagamaan (11,11%). Pada kelompok pemuda, olahraga juga menjadi aktivitas utama (41,11%), diikuti oleh fokus pada pendidikan dan pekerjaan (23,33%). Menariknya, terdapat 23,33% responden yang mengaku tidak memiliki informasi mengenai aktivitas pemuda di desa ini.

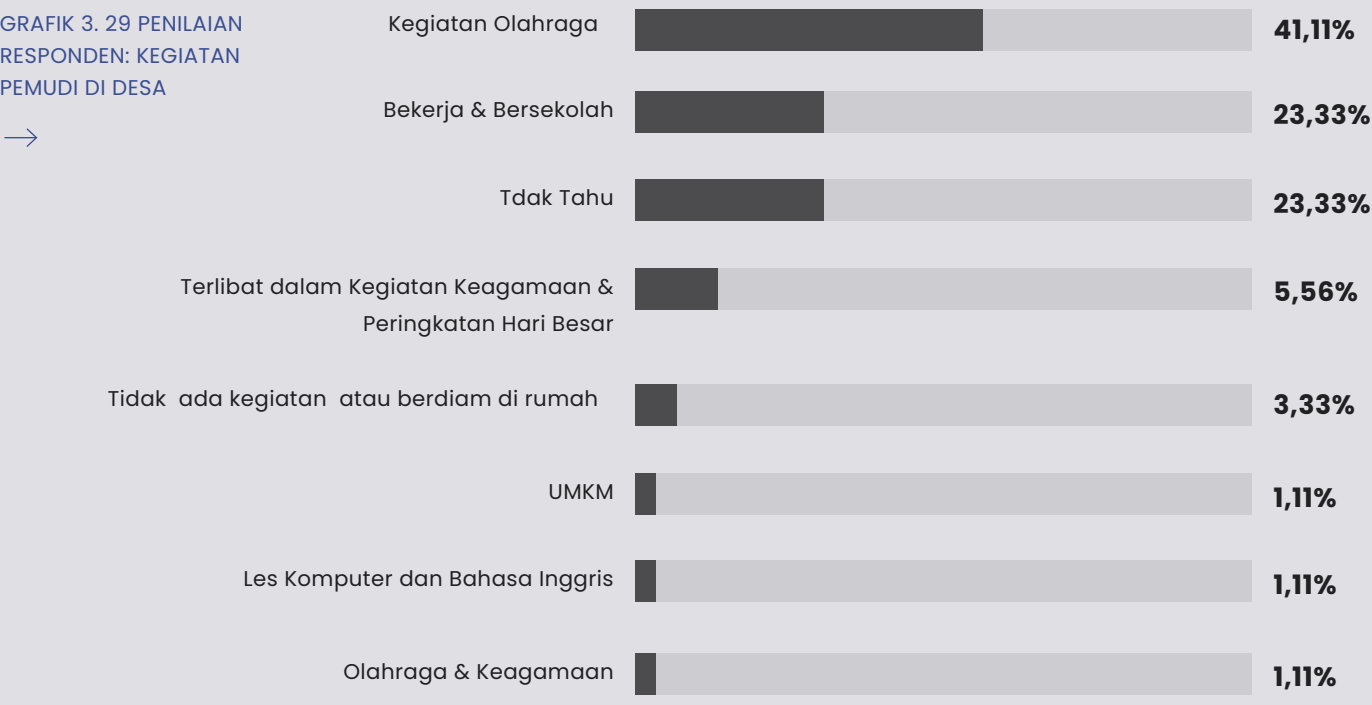
GRAFIK 3. 28 PENILAIAN RESPONDEN: KEGIATAN PEMUDA DI DESA



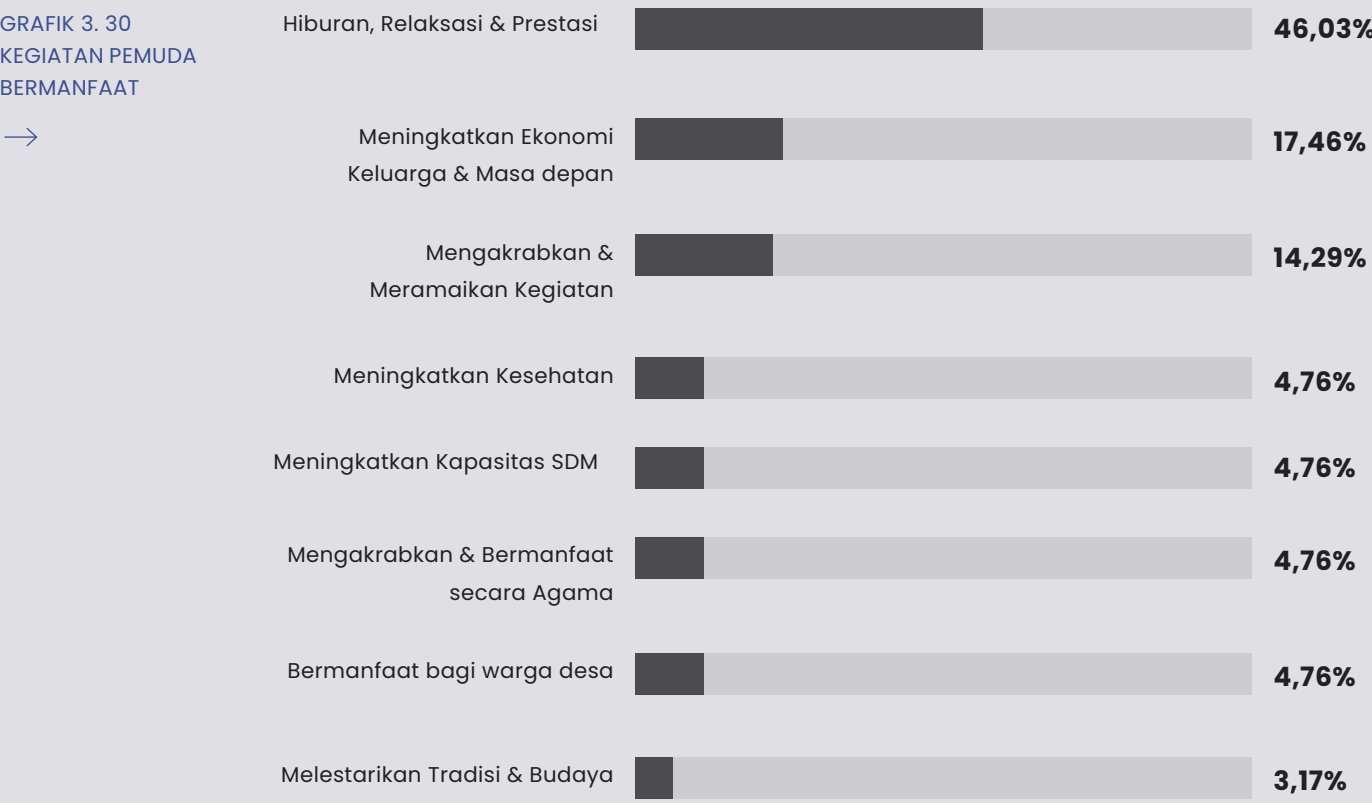
Mengenai dampak positifnya, mayoritas warga menilai kegiatan tersebut bermanfaat sebagai sarana hiburan, relaksasi, dan pencapaian prestasi (46,03% bagi pemuda dan 46,55% bagi pemuda). Perlu dicatat bahwa hiburan yang dimaksud di sini mencakup olahraga, bermain gim, hingga rekreasi ke luar desa. Selain itu, kegiatan pemuda dianggap memiliki kontribusi lebih tinggi dalam aspek peningkatan ekonomi dan masa depan (29,31%) dibandingkan kelompok pemuda (17,46%).



GRAFIK 3. 29 PENILAIAN RESPONDEN: KEGIATAN PEMUDI DI DESA



GRAFIK 3. 30 KEGIATAN PEMUDA BERMANFAAT



GRAFIK 3. 31 KEGIATAN PEMUDI BERMANFAAT



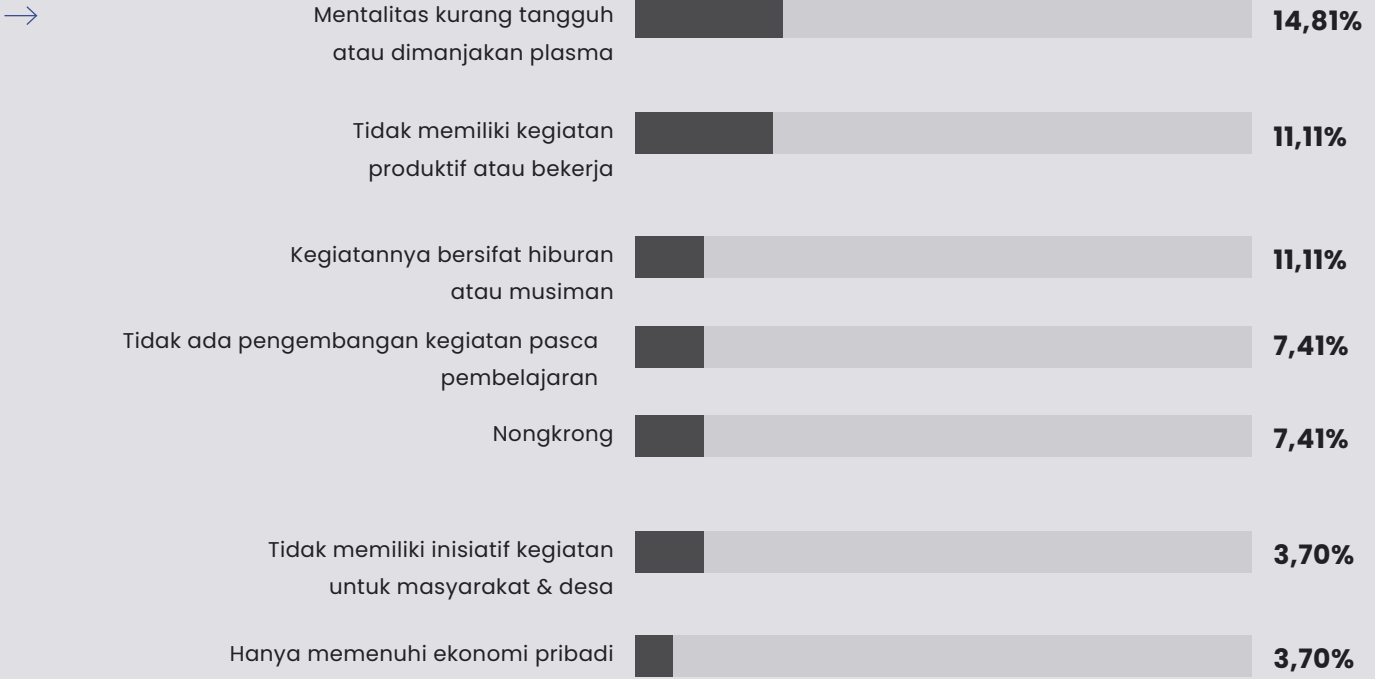
Di sisi lain, terdapat kritik mengenai efektivitas kegiatan yang dianggap kurang bermanfaat. Pada kelompok pemuda, beberapa responden menyoroti masalah mentalitas yang dianggap kurang tangguh atau terlalu bergantung pada hasil lahan plasma (14,81%), serta aktivitas yang hanya bersifat musiman dan hiburan semata (11,11%). Sementara untuk pemuda, keluhan yang muncul adalah kurangnya kontribusi nyata di desa (9,38%) serta keterbatasan inovasi (6,25%).

Satu temuan menarik muncul saat responden ditanya mengapa mereka menganggap kegiatan tersebut tidak bermanfaat. Mayoritas responden, yakni 40,74% pada kasus pemuda dan 62,50% pada pemuda, justru menjawab tidak tahu atau tidak memi-



liki informasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa penilaian negatif tersebut sering kali tidak didasari oleh argumen atau bukti kuat di lapangan, melainkan karena kurangnya keterlibatan atau ketidaktahuan responden terhadap agenda kegiatan generasi muda di desa.

GRAFIK 3. 32 KEGIATAN PEMUDA TIDAK/ KURANG BERMANFAAT



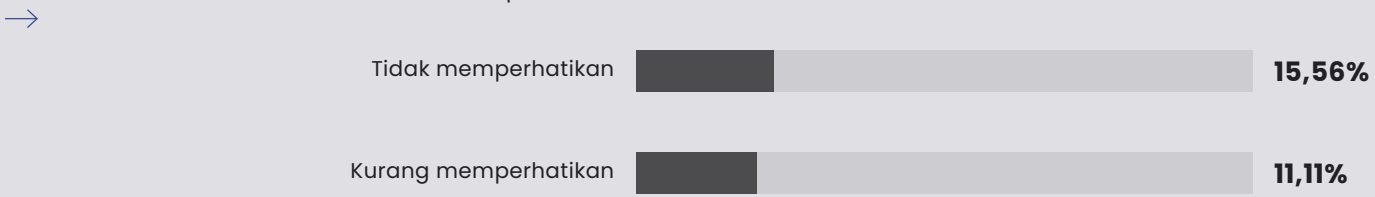
Mengenai peran pemerintah desa, penilaian responden terhadap perhatian yang diberikan kepada pemuda menunjukkan pembagian persepsi yang cukup merata. Sebagian responden merasa pemerintah desa sudah memberikan perhatian (36,67%), sementara jumlah yang sama (36,67%) berpendapat bahwa perhatian tersebut sudah ada namun masih bersifat selektif pada bidang tertentu. Di sisi lain, terdapat 15,56% responden yang merasa pemerintah desa tidak memperhatikan pemuda, dan 11,11% menilai perhatian yang diberikan masih kurang.



GRAFIK 3. 33 KEGIATAN PEMUDI KURANG/ TIDAK BERMANFAAT

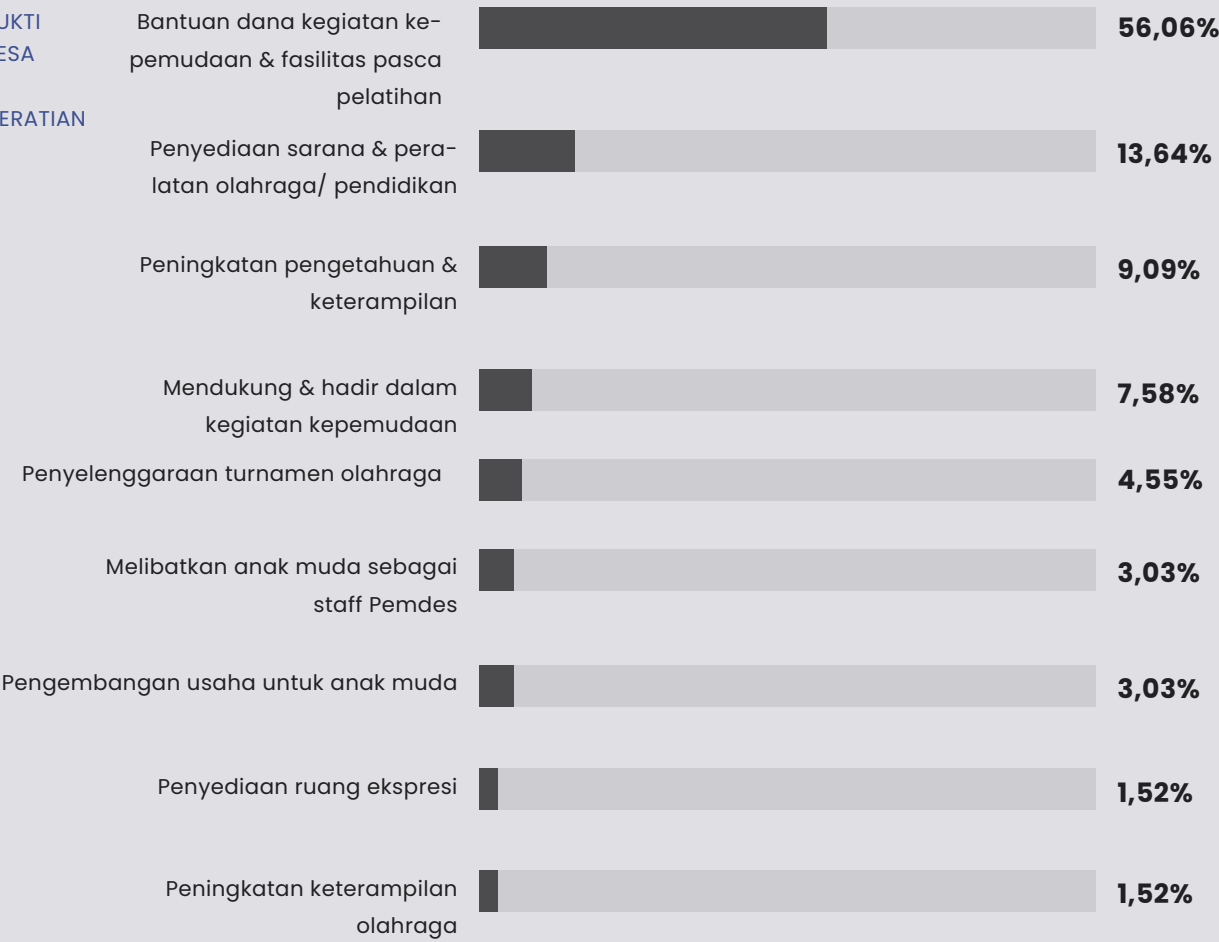


GRAFIK 3. 34 PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP PERHATIAN PEMERINTAH DESA PADA PEMUDA-PEMUDI



Bukti dukungan yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah melalui bantuan dana kegiatan serta penyediaan fasilitas pasca-pelatihan (13,64%). Bentuk dukungan lainnya mencakup upaya peningkatan keterampilan (9,09%), kehadiran perangkat desa dalam kegiatan kepemudaan (7,59%), hingga penyelenggaraan turnamen olahraga (4,55%). Berdasarkan keterangan responden, dukungan finansial yang ada saat ini

GRAFIK 3. 35 BUKTI PEMERINTAH DESA MENDUKUNG/ MEMBERIKAN PERATIAN PADA PEMUDA →



cenderung diberikan pada momen-momen tertentu saja, seperti saat pelaksanaan turnamen atau kegiatan insidental lainnya. Pada sisi yang menyatakan pemerintah desa belum memberikan dukungan, mayoritas responden (70,83%) tidak memberikan alasan spesifik karena merasa tidak memiliki informasi yang cukup terkait hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi atau penyampaian informasi mengenai program-program kepemudaan dari pihak desa kepada masyarakat umum belum menjangkau seluruh lapisan secara optimal. Adapun alasan lain yang muncul meliputi pandangan mengenai perlunya dukungan dana yang lebih rutin (12,50%) serta keinginan agar anak muda lokal lebih dilibatkan dalam agenda-agenda desa (4,17%).



GRAFIK 3. 36 BUKTI PEMERINTAH DESA BELUM MENDUKUNG/ MEMBERIKAN PERHATIAN PADA PEMUDA →



Aspirasi masyarakat mengenai pengembangan pemuda di Desa Tepian Langsung sangat terfokus pada penguatan fasilitas fisik dan kapasitas diri. Usulan terbanyak berkaitan dengan pengadaan kegiatan serta sarana olahraga dan hiburan yang mencapai 58,89%. Besarnya harapan pada sektor ini sejalan dengan aktivitas lapangan yang menunjukkan tingginya minat warga terhadap olahraga, seperti voli yang dilakukan secara rutin dan kolektif setiap sore. Di sisi lain, terdapat antusiasme pada cabang olahraga lain seperti bulu tangkis yang tercermin dari kepemilikan perlengkapan olahraga secara pribadi oleh banyak warga, meskipun fasilitas penunjang seperti lapangan khusus belum tersedia secara memadai di desa.

Selain kebutuhan sarana fisik, responden juga mengusulkan pengembangan usaha dan ekonomi kreatif (13,33%) serta penguatan kapasitas organisasi kepemudaan (10%). Usulan lainnya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan (8,89%), penyediaan lapangan kerja (2,22%), serta penyediaan ruang untuk berekspresi dan berpendapat (1,11%). Sebagian kecil warga juga mengharapkan adanya peningkatan fasilitas pendidikan, pelibatan pemuda dalam agen-

da pemerintah desa, serta pemberian ruang ekspresi yang lebih luas bagi generasi muda. Berbagai usulan ini menitikberatkan pada pentingnya dukungan sarana hobi yang dibarengi dengan program pemberdayaan untuk menunjang produktivitas dan kemandirian ekonomi pemuda.

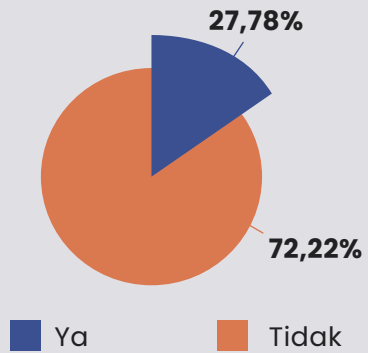
GRAFIK 3. 37
USULAN KEGIATAN
PEMUDA PADA
PEMERINTAH DESA



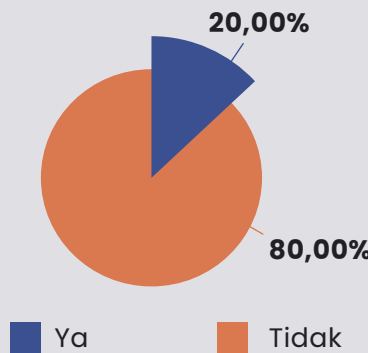
3. Peningkatan Kapasitas Orang Muda

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Tepian Langsung melalui jalur formal menunjukkan capaian yang masih perlu dioptimalkan. Berdasarkan data satu tahun terakhir, responden yang pernah menerima pelatihan peningkatan keterampilan atau pengetahuan tercatat sebesar 27,78%, sementara mayoritas besar sebanyak 72,22% menyatakan tidak pernah

GRAFIK 3. 38 MENERIMA PELATIHAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN ATAU
PENGETAHUAN DALAM 1 TAHUN
TERAKHIR



GRAFIK 3. 39 AKSES BANTUAN DAN
PROGRAM DARI PEMERINTAH DESA



mendapatkan pelatihan serupa. Secara historis, berbagai program pelatihan memang pernah dilaksanakan di desa, namun intensitasnya dirasakan lebih tinggi pada beberapa tahun ke belakang dibandingkan dengan periode terkini.

Kondisi ini berjalan beriringan dengan akses masyarakat terhadap bantuan dan program kerja pemerintah desa secara umum. Hanya 20% responden yang menyatakan pernah mengakses bantuan atau program desa, sedangkan 80% lainnya merasa tidak pernah terlibat atau menerima manfaatnya. Dari sisi penerima manfaat, bantuan yang turun cenderung bersifat situasional atau darurat, seperti bantuan logistik saat terjadi bencana banjir, dan belum menyentuh pada program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Terdapat catatan kritis mengenai efektivitas komunikasi dan dampak dari program-program besar yang dicanangkan desa. Salah satunya adalah program "satu rumah satu truk" yang nyatanya tidak muncul dalam narasi kebanggaan warga atas program yang diberikan oleh desa.

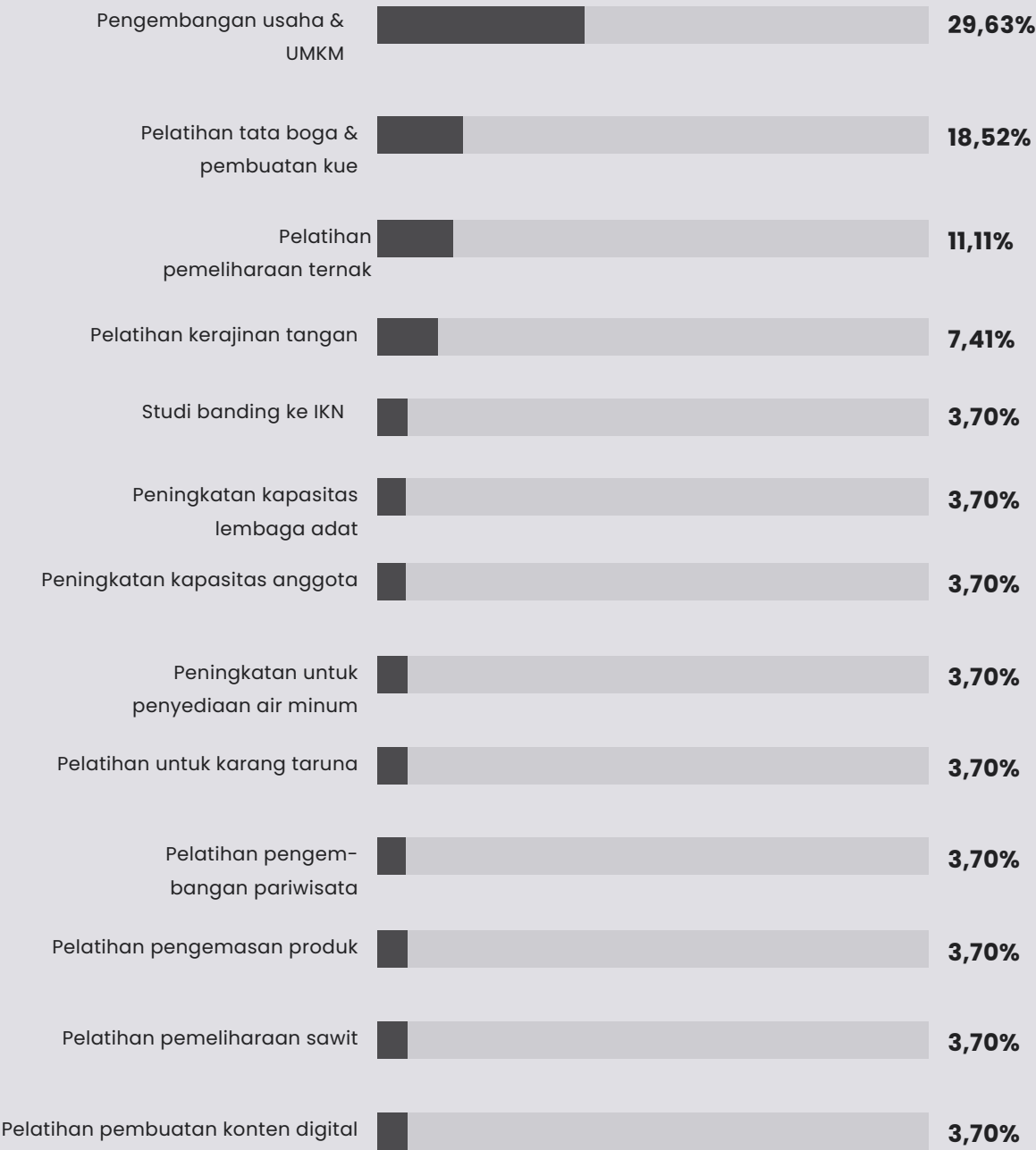
Dalam satu tahun terakhir, jenis pelatihan yang paling banyak diterima oleh responden meliputi pengembangan usaha dan UMKM (29,63%), tata boga dan pembuatan kue (18,52%), pemeliharaan ternak (11,11%), serta kerajinan tangan (7,41%). Meski program-program tersebut telah menyentuh aspek keterampilan teknis, efektivitasnya dalam mengubah kondisi ekonomi warga masih terkendala oleh ketiadaan dukungan lanjutan. Warga mengungkapkan bahwa pelatihan yang diberikan, seperti tata boga maupun UMKM, sering kali tidak disertai dengan akses permodalan atau pendampingan (follow-up) yang konkret, sehingga keterampilan yang didapat sulit untuk diwujudkan menjadi unit usaha yang mandiri.

Ketidakselarasan antara program yang ada dengan kebutuhan riil masyarakat juga terlihat dari daftar usulan pelatihan di masa depan. Mayoritas responden (47,78%) mengharapkan adanya



peningkatan kapasitas di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Aspirasi ini sangat rasional mengingat sektor-sektor tersebut merupakan sumber penghasilan utama warga di Desa Tepian Langsung. Hal ini sejalan dengan temuan Aprilia dkk (2019) bahwa pilihan masa depan pemuda pedesaan sangat dipengaruhi oleh aset keluarga; semakin luas lahan pertanian yang dimiliki orang tua, semakin besar kecenderungan kaum muda

GRAFIK 3. 40
JENIS PELATIHAN
YANG DITERIMA
RESPONDEN DALAM
1 TAHUN TERAKHIR



untuk tetap memilih mata pencaharian di sektor pertanian daripada mencari pekerjaan di luar sektor tersebut ⁷. Selain itu, warga juga mengusulkan pelatihan wirausaha dan pengembangan UMKM (27,78%), perbengkelan (3,33%), hingga pemasaran dan pembuatan konten digital (2,22%).

Tingginya usulan pada sektor agraris memberikan sinyal bahwa masyarakat menginginkan program yang lebih relevan dengan konteks ruang hidup mereka. Peningkatan kapasitas yang diharapkan bukan sekadar pemberian keterampilan baru yang bersifat sampingan, melainkan penguatan pada keahlian utama yang dapat langsung berdampak pada produktivitas lahan dan stabilitas ekonomi rumah tangga mereka.

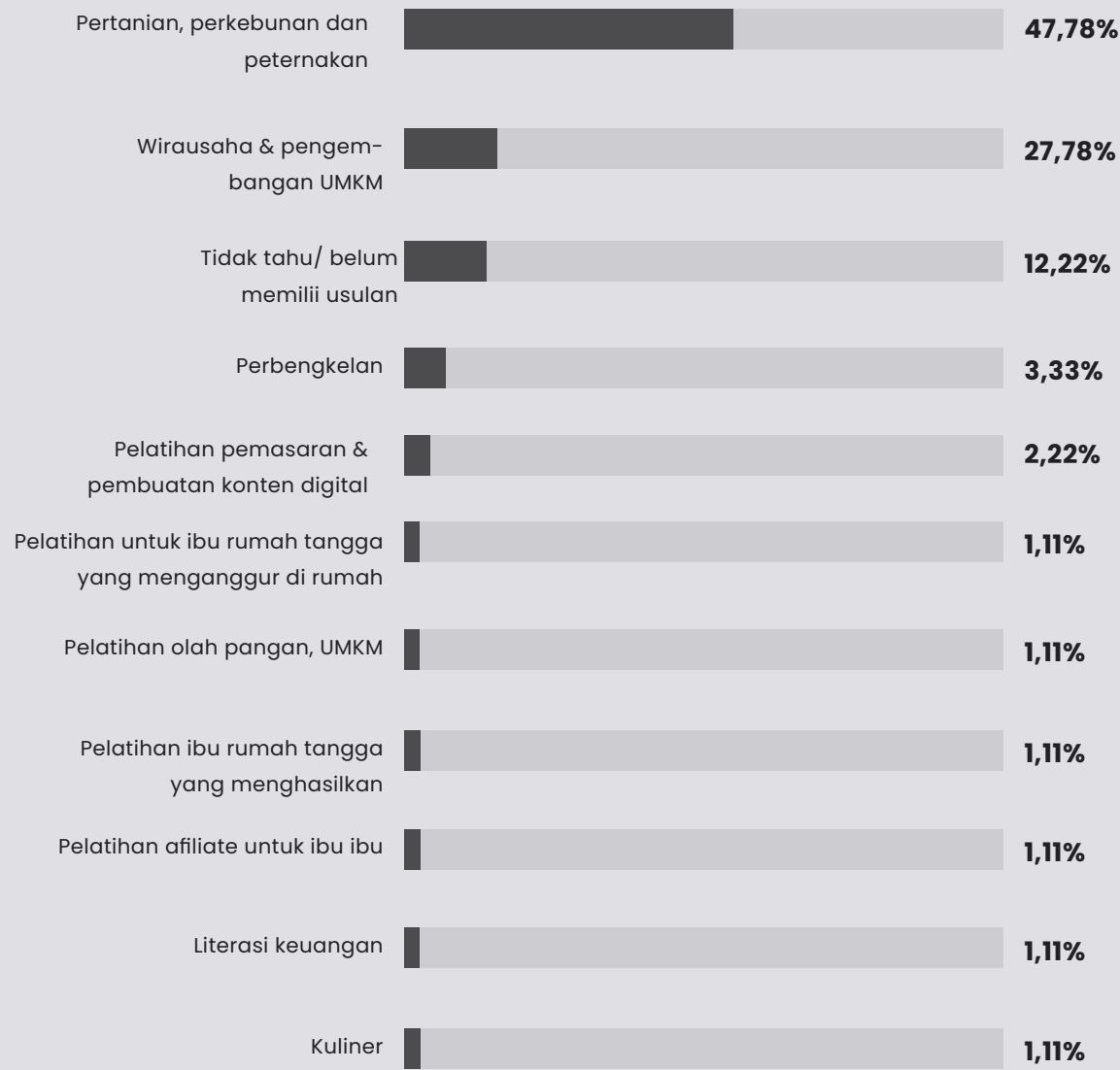
Di luar dominasi komoditas sawit, saat ini mulai muncul inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan dari lingkup rumah tangga. Warga mulai menanam sayur-sayuran, terlebih karena harga sayur di wilayah ini tergolong mahal akibat ketergantungan pada pasokan luar. Namun, aktivitas ini menghadapi tantangan alam yang serius berupa gangguan monyet yang masuk ke lahan warga untuk mencari makan. Selain itu, potensi peternakan juga mulai dilakoni oleh sebagian warga melalui bantuan bibit sapi. Namun, keberlanjutan kelompok tani di sektor ini masih terkendala oleh pendampingan yang tidak konsisten, sehingga warga sering kali merasa kebingungan dalam mengelola bantuan tersebut secara kontinu.

Aspirasi masyarakat terhadap penguatan sektor agraris ini juga perlu dimaknai dalam konteks aspirasi pemuda pedesaan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Griffin dkk (2024), pemuda pedesaan di Indonesia sebenarnya tetap bercita-cita pada pekerjaan bergaji modern dan keamanan finansial tanpa ha-

7 Anisa Aprilia, dkk., “Preference of Rural Youth Livelihood in Indonesia Rural Areas and Its Factors,” *Habitat* 30(3) (2019): 88–95.



GRAFIK 3. 41
USULAN PELATIHAN
UNTUK WARGA

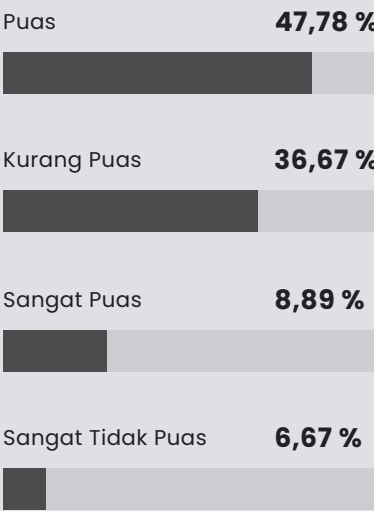


rus sepenuhnya meninggalkan kehidupan desa atau mata pencaharian berbasis pertanian. Temuan tersebut menantang asumsi bahwa menjauhnya pemuda dari sektor pertanian semata-mata disebabkan oleh rendahnya minat, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya lahan yang aman dan menguntungkan ⁸.

8 Christina Griffin, dkk., "The Persistence of Precarity: Youth Livelihood Struggles and Aspirations in the Context of Truncated Agrarian Change, South Sulawesi, Indonesia," Agriculture and Human Values 41 (2024): 293–311.



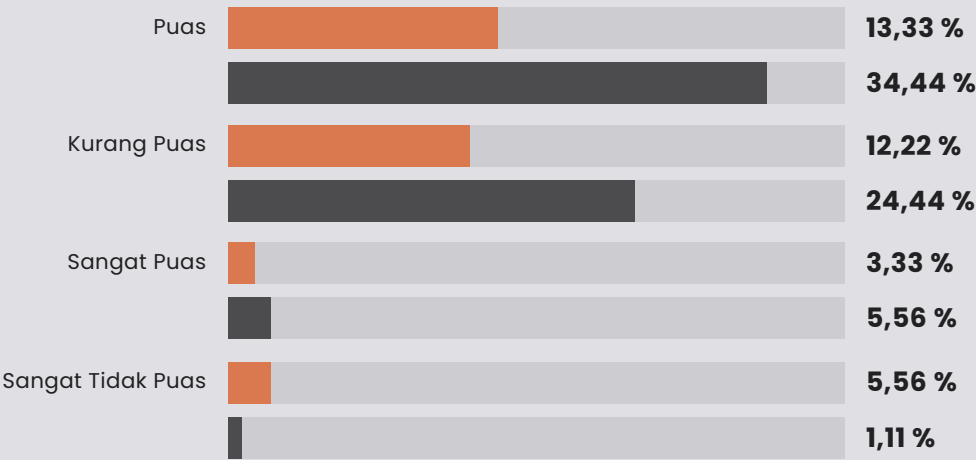
GRAFIK 3. 42 PENILAIAN RESPONDEN
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DESA



GRAFIK 3. 43 PENILAIAN
RESPONDEN TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DESA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

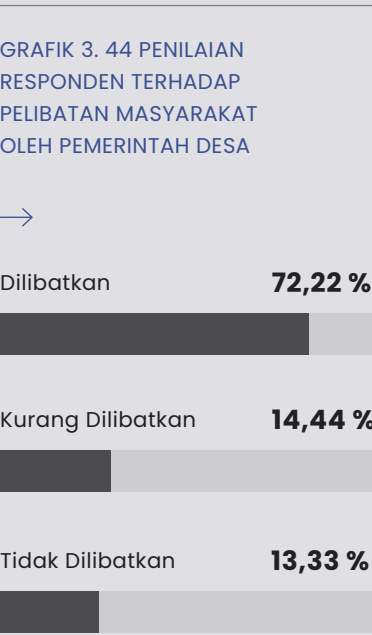


■ Laki Laki
■ Perempuan



5. Kinerja Pemerintah Desa

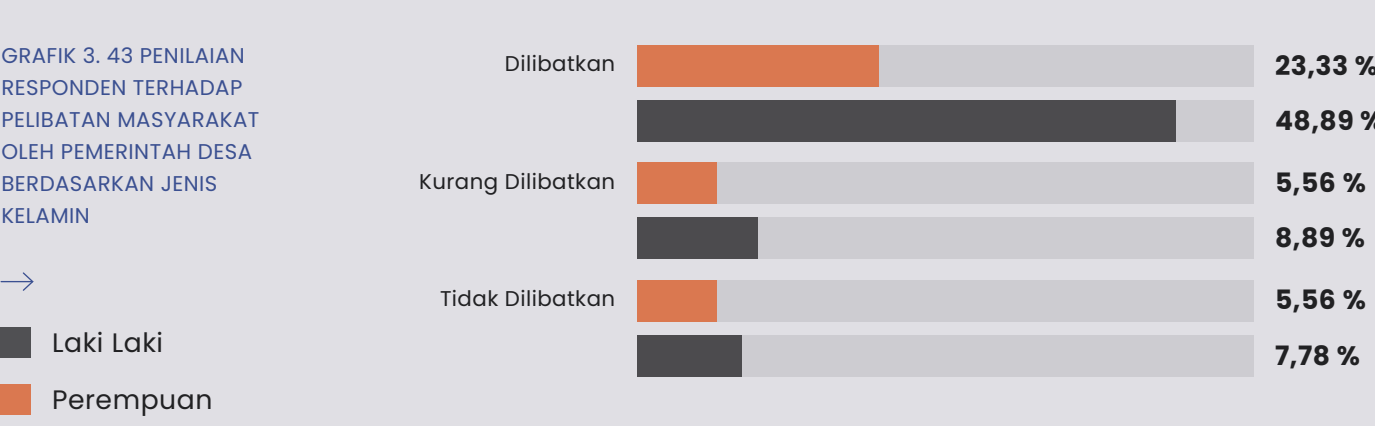
Penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Tepian Langsung menunjukkan spektrum persepsi yang cukup beragam. Secara akumulatif, mayoritas responden menyatakan puas (47,78%) dan sangat puas (8,89%) terhadap kinerja desa. Namun, angka ketidakpuasan berada pada posisi yang cukup signifikan, di mana 36,67% responden merasa kurang puas dan 6,67% lainnya menyatakan sangat tidak puas. Jika dibedah berdasarkan jenis kelamin, terlihat dinamika yang kontras pada kelompok responden perempuan. Meski secara umum kelompok laki-laki mendominasi angka ketidakpuasan, pada kategori "sangat tidak puas", proporsi perempuan justru jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni mencapai 5,56% berbanding 1,11%. Kondisi ini memberikan sinyal adanya kelompok perempuan di desa yang merasa sangat tidak terakomodasi oleh kebijakan atau program pemerintah desa saat ini.



Ketidakpuasan yang muncul di tingkat akar rumput ini sering kali berakar pada perasaan pengabaian dan kurangnya pemerataan. Berdasarkan penuturan responden, terdapat sentimen bahwa mereka merasa "dianak tirikan" atau bahkan mengalami diskriminasi dalam distribusi perhatian maupun program pembangunan desa. Masalah ini diperumit dengan aspek transparansi pemerintah desa yang dianggap masih belum terlihat, terutama menyangkut keterbukaan informasi anggaran dan kejelasan program-program yang dijalankan. Minimnya akses informasi ini menciptakan sekat antara pemerintah desa dan warga, yang pada akhirnya memicu ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas tata kelola pemerintahan desa.

Mengenai aspek partisipasi, mayoritas responden sebesar 72,22% merasa sudah dilibatkan dalam agenda pemerintah desa, sementara sisanya terbagi antara yang merasa kurang dilibatkan (14,44%) dan tidak dilibatkan sama sekali (13,33%). Jika ditinjau dari perspektif gender, pelibatan laki-laki terlihat jauh lebih dominan dengan angka 48,89%, sedangkan perempuan hanya berada di angka 23,33%. Meskipun persentase yang menyatakan "tidak dilibatkan" antara laki-laki dan perempuan cenderung berimbang, selisih besar pada kategori "dilibatkan" menunjukkan bahwa ruang partisipasi aktif masih lebih banyak terbuka atau diakses oleh kelompok laki-laki.

Namun, tingginya angka pelibatan secara administratif ini tidak serta-merta mencerminkan kualitas partisipasi yang substansial. Secara prosedural, masyarakat memang diundang dan hadir dalam rangkaian musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun, hingga desa. Sayangnya, keterlibatan tersebut dirasakan warga cenderung bersifat pasif. Muncul kesan kuat di tengah masyarakat bahwa pertemuan-pertemuan tersebut hanya menjadi



forum validasi formal, karena keputusan atau hasil musyawarah sering kali dianggap sudah ditentukan sejak awal sebelum rapat dimulai. Kondisi ini membuat kehadiran warga dalam forum-forum desa sebatas menggugurkan kewajiban prosedural tanpa adanya ruang dialogis yang benar-benar memengaruhi arah kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil pemetaan aspirasi, terdapat lima persoalan krusial yang dianggap masyarakat sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani oleh Pemerintah Desa Tepian Langsung, yaitu pemenuhan kebutuhan listrik, perbaikan infrastruktur dan akses jalan, kejelasan sertifikat tanah, penguatan sinyal komunikasi, dan akses air bersih.

Kebutuhan akan aliran listrik menjadi prioritas utama yang konsisten muncul di seluruh kategori jawaban responden. Bagi warga, urgensi listrik tidak hanya menyangkut penerangan, tetapi berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan akses informasi. Ketersediaan listrik yang stabil sangat dibutuhkan untuk mengawetkan bahan makanan agar dapat bertahan lebih lama, yang secara langsung berdampak pada efisiensi pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini mencerminkan temuan Krishna dan Kubitza (2021), yang menyatakan bahwa ekspansi sektor perkebunan

sering kali meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses barang privat, namun tidak disertai dengan penyediaan barang publik yang signifikan oleh pemerintah maupun industri ⁹.

Di lapangan, hal ini memicu ketimpangan infrastruktur yang mencolok antara Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Indah sebagai desa hasil pemekarannya. Sementara warga Tepian Langsung telah berpuluh tahun mengeluhkan ketiadaan akses listrik negara, Tepian Indah telah teraliri listrik PLN secara memadai. Merujuk pada studi Davino Sayaza dan Nadiya Stephanie (2024), perbedaan akses listrik ini mewakili lebih dari sekadar masalah teknis, karena secara fundamental membentuk jangkauan aktivitas ekonomi yang memungkinkan di dalam komunitas tersebut ¹⁰. Ketimpangan ini menjadi ironi bagi warga desa induk yang masih terbebani biaya energi tinggi untuk mendukung kegiatan produktif mereka.

Selain itu, masalah sertifikat tanah menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat di wilayah transmigrasi Dusun 3. Status kepemilikan lahan di wilayah tersebut masih terjebak dalam ketidakpastian hukum akibat konflik dengan salah satu perusahaan, sehingga warga mendesak adanya langkah konkret untuk memperjelas hak atas tanah mereka. Persoalan infrastruktur jalan dan akses sinyal komunikasi juga menjadi hambatan besar dalam aktivitas keseharian. Sulitnya sinyal internet memaksa warga, terutama generasi muda, harus mendaki area perbukitan hanya untuk berkirim pesan atau mencari informasi. Kondisi

9 Vijesh V. Krishna dan Christoph Kubitz., “Impact of Oil Palm Expansion on the Provision of Private and Community Goods in Rural Indonesia,” *Ecological Economies* 179 (2021)

10 Mas Davino Sayaza dan Endah Nadiya Stephanie., “Rural Livelihood Diversification and Economic Adaptation in East Kalimantan: Evidence from Six Village Communities,” *Jurnal Rekayasa Lingkungan dan Biosisten* 3(1) (2025): 53–64.

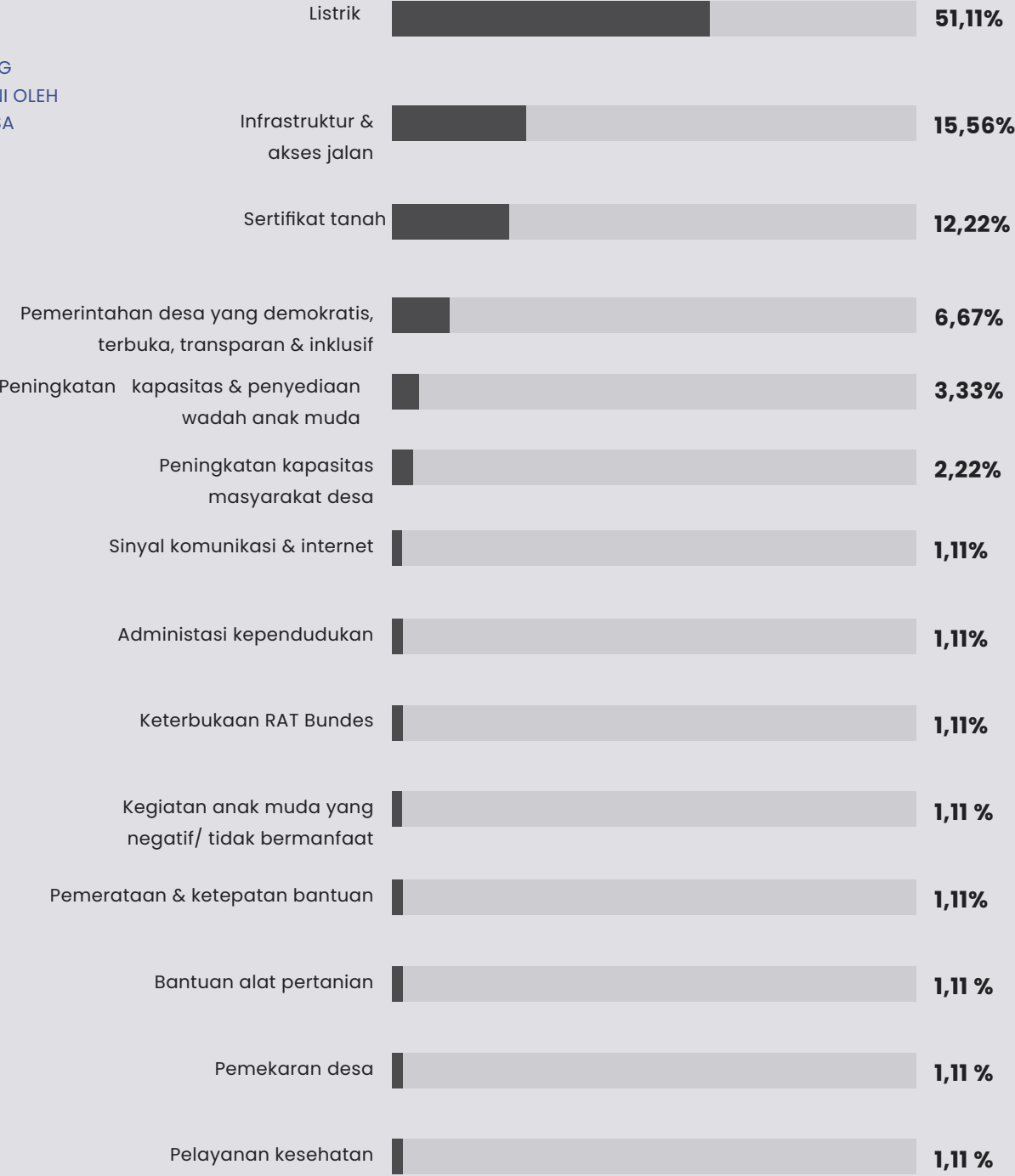
ini juga dikeluhkan oleh kelompok perempuan yang merasa terhambat dalam membuka peluang ekonomi digital akibat keterbatasan sinyal dan daya listrik.

Terakhir, krisis air bersih masih menjadi persoalan fundamental yang membayangi keseharian warga. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk bergantung pada air mineral kemasan untuk konsumsi harian, yang menuntut mereka harus terus membeli dan menyediakan stok dalam jumlah besar. Sementara untuk keperluan MCK, warga terpaksa menggunakan air sungai yang kondisinya tidak layak karena berwarna cokelat. Kondisi ini diperparah dengan akses jalan sepanjang 32 kilometer yang belum diaspal, di mana menurut studi Davino Sayaza dan Nadiya Stephanie (2024), hambatan infrastruktur tersebut membuat produk pertanian desa menjadi kurang kompetitif di pasar regional sekaligus meningkatkan harga komoditas pokok sebesar 15–20% di atas harga perkotaan ¹¹. Kelima persoalan ini membentuk pola kebutuhan masyarakat yang menginginkan adanya transformasi layanan dasar demi menunjang produktivitas dan kesejahteraan hidup yang lebih layak di desa.

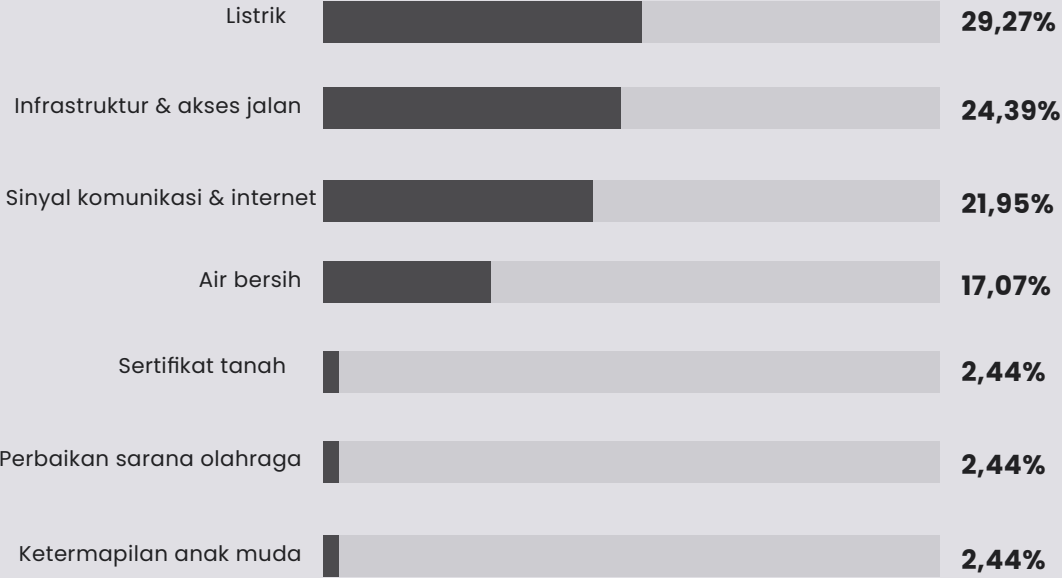
11 Ibid



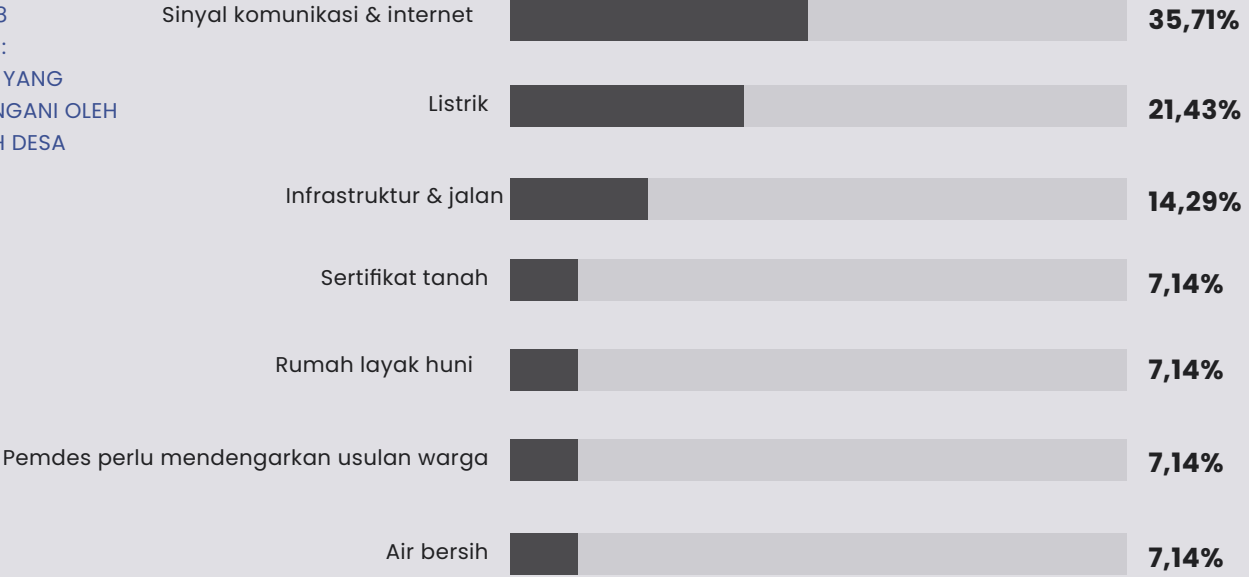
GRAFIK 3. 46
PRIORITAS 1:
PERSOALAN YANG
PERLU DITANGANI OLEH
PEMERINTAH DESA



GRAFIK 3. 47
PRIORITAS 2:
PERSOALAN YANG
PERLU DITANGANI OLEH
PEMERINTAH DESA



GRAFIK 3. 48
PRIORITAS 3:
PERSOALAN YANG
PERLU DITANGANI OLEH
PEMERINTAH DESA



Hasil Analisis



Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat di Desa Tepian Langsung serta memahami bagaimana struktur ekonomi desa membentuk peluang dan keterbatasan bagi generasi muda dalam pembangunan lokal. Variabel yang diuji secara kuantitatif mencakup kepemilikan aset berupa luas lahan, latar belakang pendidikan, suku/etnis, jenis pekerjaan, usia, dan lokasi tempat tinggal berdasarkan wilayah dusun.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor sosial-historis seperti latar belakang suku memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap tingkat pendapatan dibandingkan faktor individual seperti pendidikan formal atau lokasi tempat tinggal. Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi kesejahteraan di Desa Tepian Langsung tidak semata-mata ditentukan oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh sejarah distribusi aset produktif dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

1. Dominasi Penduduk Asli di Tengah Ketersamaan Akses Antar-Dusun

Jika melihat hasil perhitungan secara mendalam, faktor latar belakang suku muncul sebagai pembeda yang paling signifikan terhadap pendapatan di Desa Tepian Langsung. Dalam analisis ini, Suku Kutai sebagai penduduk asli digunakan sebagai kelompok pembanding. Hasilnya menunjukkan bahwa warga dari kelompok suku pendatang memiliki posisi pendapatan yang berada di bawah Suku Kutai; warga Suku Jawa tercatat memiliki rata-rata penghasilan Rp2,13 juta lebih rendah, dan Suku Bugis sekitar Rp2,06 juta lebih rendah dibandingkan dengan Suku Kutai (keduanya signifikan pada $p < 0.10$). Kondisi ini menunjukkan adanya dominasi ekonomi yang masih dipegang oleh penduduk asli dibandingkan kelompok pendatang.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan faktor wilayah dusun. Jika dibandingkan dengan Dusun 1 sebagai acuan, warga yang tinggal di Dusun 2 dan Dusun 3 tidak menunjukkan perbedaan pendapatan yang berarti, dengan koefisien negatif yang sangat kecil masing-masing sebesar Rp105 ribu dan Rp102 ribu. Temuan ini menegaskan bahwa lokasi tempat tinggal bukan merupakan penghambat bagi warga dalam mencari nafkah karena akses ekonomi sudah tersebar merata di seluruh lingkungan dusun.

Temuan kuantitatif mengenai dominasi pendapatan penduduk asli juga diperkuat oleh hasil observasi dan wawancara lapangan. Secara kualitatif, terlihat bahwa warga Suku Kutai umumnya memiliki ikatan historis yang lebih kuat terhadap kepemilikan lahan dan akses terhadap jaringan ekonomi lokal. Masyarakat lokal suku Kutai adalah penerima pembagian lahan plasma, sehingga memiliki posisi tawar yang lebih mapan dalam struktur ekonomi desa. Selain itu, hubungan kekerabatan yang erat antar-keluarga asli turut memperkuat distribusi informasi dan peluang kerja, baik di sektor perkebunan maupun usaha mandiri.

Sebaliknya, kelompok pendatang seperti Jawa dan Bugis cenderung memulai aktivitas ekonomi dari posisi yang lebih terbatas. Berdasarkan penuturan beberapa responden, akses terhadap lahan maupun modal

usaha bagi kelompok pendatang sering kali bergantung pada hubungan kerja atau sistem sewa, bukan kepemilikan langsung (kerja serabutan). Beberapa responden dari suku Jawa mengatakan hal yang serupa,

Di Kalimantan, ketika kamu tidak bisa makan artinya kamu malas. Yang penting mau bergerak

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa suku pendatang mempunyai harapan yang besar untuk mencari nafkah di Kalimantan. Alhasil, mereka akan bekerja apapun untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka lebih fluktuatif dan sangat bergantung pada musim panen atau permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, perbedaan pendapatan antar-suku bukan semata-mata persoalan etnisitas, melainkan berkaitan erat dengan sejarah distribusi aset dan akses awal terhadap sumber daya produktif.

Hasil regresi menunjukkan bahwa kelompok pendatang memiliki rata-rata pendapatan lebih rendah dibandingkan penduduk asli Suku Kutai—sekitar Rp2,13 juta pada Suku Jawa dan Rp2,06 juta pada Suku Bugis. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh faktor etnisitas, melainkan oleh ketimpangan akses awal terhadap kepemilikan lahan plasma dan jaringan ekonomi lokal, di mana penduduk asli secara historis memiliki posisi lebih mapan dalam struktur aset produktif. Sebaliknya, kelompok pendatang yang umumnya tidak memiliki lahan bergantung pada sistem sewa atau hubungan kerja, sehingga pendapatan mereka lebih fluktuatif dan bergantung pada permintaan tenaga kerja musiman.

2. Mengapa Pendidikan Belum Menjamin Tingkat Kesejahteraan?

Hal menarik lainnya terlihat pada karakteristik individu seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Dengan menggunakan kelompok warga yang tidak lulus SD atau tidak pernah sekolah sebagai dasar perbandingan, hasil analisis menunjukkan tren linear di mana setiap kenaikan jenjang pendidikan formal diikuti oleh peningkatan rata-rata pendapatan warga. Warga lulusan SD memiliki selisih pendapatan Rp478 ribu lebih tinggi, lulusan SMP Rp1,08 juta lebih tinggi, lulusan SMA Rp1,33 juta lebih tinggi, dan lulusan Perguruan Tinggi memiliki selisih mencapai Rp1,79 juta lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak sekolah.

Meskipun secara angka terdapat kenaikan, namun secara statistik rentang perbedaan ini belum dianggap signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di Desa Tepian Langsung, pendidikan formal belum menjadi penentu utama besaran penghasilan. Hal ini dapat dijelaskan melalui penuturan pengalaman responden. Pola pengaruh yang tidak terlalu dominan ini juga terlihat pada

variabel jenis kelamin. Kelompok laki-laki memiliki penghasilan rata-rata Rp424 ribu lebih tinggi dari perempuan. Perbedaan ini cenderung dipengaruhi oleh kuatnya peran perempuan di sektor domestik, meskipun banyak yang tetap produktif melalui pengelolaan UMKM atau membantu di sektor perkebunan.

Kondisi tersebut semakin dipertegas oleh faktor usia, di mana kelompok pemuda mencatatkan pendapatan yang Rp752 ribu lebih rendah dibandingkan kelompok usia yang lebih tua (non-pemuda). Hal ini menciptakan sebuah fenomena di mana pendidikan tinggi yang dimiliki kelompok pemuda belum mampu dikonversi menjadi pendapatan yang signifikan karena struktur ekonomi desa masih sangat bergantung pada penguasaan aset fisik. Selain itu, kelompok usia yang lebih tua cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber pendapatan lain atau pekerjaan sampingan di luar sektor perkebunan. Akumulasi dari beragam sumber penghasilan inilah yang membuat pendapatan mereka tetap melampaui kelompok pemuda, meskipun kelompok pemuda mungkin memiliki latar belakang pendidikan formal yang lebih baik.

Melanjutkan analisis diatas, ditemukan bahwa sistem plasma yang memberikan pendapatan rutin turut membentuk mentalitas

ketergantungan pada sebagian generasi muda. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang responden,

Banyak anak muda yang nganggur karena kebutuhannya sudah terpenuhi dari hasil plasma

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber pendapatan pasif mengurangi dorongan untuk membangun usaha baru atau meningkatkan kapasitas diri. Pemuda tidak sepenuhnya terdorong untuk mencari alternatif ekonomi karena kebutuhan dasar telah tercukupi melalui distribusi hasil keluarga. Namun, situasi ini bukan semata persoalan kemauan individu. Ketika sistem ekonomi desa tidak menawarkan diversifikasi peluang kerja, pemuda memiliki pilihan terbatas: tetap bergantung pada keluarga atau keluar desa. Dalam konteks ini, ketergantungan bukan hanya mentalitas, tetapi juga hasil dari struktur peluang yang sempit

Meskipun terdapat tren peningkatan pendapatan seiring kenaikan jenjang pendidikan, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa pendidikan formal belum menjadi penentu utama kesejahteraan ekonomi di Desa Tepian Langsung. Kelompok pemuda bahkan memiliki rata-rata pendapatan sekitar Rp752 ribu lebih rendah dibandingkan kelompok usia yang lebih tua, karena keterbatasan akses terhadap aset produktif seperti lahan serta minimnya peluang kerja alternatif di luar sektor perkebunan. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan antar-generasi tidak semata ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh sempitnya struktur peluang ekonomi yang tersedia.

3. Antara Luas Aset dan Rendahnya Nilai Tambah Ekonomi

Mengenai modal usaha dan sektor mata pencaharian, analisis ini menggunakan sektor formal (seperti pegawai dan karyawan) sebagai dasar perbandingan. Jika dibandingkan dengan warga yang bekerja di sektor formal, warga yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa justru memiliki penghasilan rata-rata Rp1,65 juta lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mandiri memiliki potensi yang sangat bersaing dan mampu memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan menjadi pekerja formal di desa. Di sisi lain, sektor pertanian hanya terpaut Rp28 ribu dari sektor formal, yang menandakan tidak adanya perbedaan mencolok di antara keduanya.

Temuan menarik muncul pada variabel luas lahan, di mana setiap penambahan satu hektar lahan hanya memberikan kenaikan pendapatan rata-rata sebesar Rp332 ribu. Nilai tambah yang relatif kecil ini mengonfirmasi bahwa sekadar memiliki lahan yang luas belum cukup untuk menjamin lonjakan pendapatan



jika tidak dikelola secara maksimal. Walaupun demikian, secara subjektif, kepemilikan lahan tetap menjadi indikator utama kesejahteraan warga. Hal ini terlihat dari tingginya persepsi positif pada kelompok pemilik lahan yang merasa jauh lebih sejahtera dibandingkan mereka yang tidak memiliki lahan.

Di sisi lain, ketiadaan lahan justru memberikan fleksibilitas ekonomi yang berbeda. Karena jumlah warga tanpa lahan relatif lebih sedikit, mereka memiliki posisi tawar yang kuat di pasar tenaga kerja perkebunan. Kondisi ini memungkinkan kelompok non-pemilik lahan untuk mengalokasikan tenaga mereka secara maksimal di berbagai lahan milik warga lain secara bergantian. Kapasitas untuk bekerja di banyak tempat sekaligus inilah yang menciptakan peluang bagi kelompok non-pemilik lahan untuk memperoleh akumulasi pendapatan harian yang bisa saja melampaui hasil bersih yang diterima oleh pemilik lahan.

Setiap penambahan satu hektar lahan hanya meningkatkan pendapatan sekitar Rp332 ribu, menunjukkan bahwa kepemilikan lahan belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa pengelolaan produktif dan diversifikasi usaha. Sebaliknya, sektor perdagangan dan jasa memiliki potensi pendapatan lebih tinggi, membuka peluang bagi generasi muda untuk mendorong transformasi ekonomi desa. Namun, keterbatasan akses terhadap pelatihan, permodalan, dan ruang pengambilan keputusan berisiko menghambat pengembangan potensi tersebut.

Meskipun saat ini posisi pemuda relatif lebih lemah dalam struktur penguasaan aset, mereka justru memiliki potensi terbesar untuk mendorong diversifikasi ekonomi desa. Hasil regresi menunjukkan bahwa sektor dagang/jasa memiliki koefisien positif sebesar Rp1,65 juta dibanding sektor formal, yang menandakan adanya peluang ekonomi yang cukup besar di luar pola ekonomi konvensional. Secara kualitatif, pemuda cenderung lebih adaptif terhadap teknologi, memiliki jejaring sosial yang lebih luas, serta lebih terbuka terhadap model usaha baru. Namun, tanpa dukungan berupa pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi desa, potensi ini berisiko tidak berkembang secara optimal. Transformasi ekonomi desa berbasis kepemudaan memerlukan intervensi yang secara sadar membuka ruang regenerasi dan distribusi akses sumber daya.

4. Relasi Kuasa dan Terbatasnya Ruang Partisipasi Pemuda

Dimensi kepemudaan juga sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam desa. Salah satu pemuda menggambarkan situasi sosial dengan metafora,

Orang tua di sini masih punya pengaruh yang besar

Ungkapan ini mencerminkan adanya dominasi figur/tokoh, kelompok, keluarga tertentu dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur seperti ini, pemuda sulit mendapatkan ruang untuk mengemukakan gagasan atau terlibat dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Ide-ide baru sering kali tidak memperoleh legitimasi karena tidak berasal dari lingkaran pengaruh utama. Terkait dengan ide-ide baru, seorang pemuda mengatakan,

Kita pernah diberikan ruang mas. Cuma setelah ide ini disusun dan diajukan, seringkali ide anak muda ini diubah sesuai keinginan mereka

Hal itu mengakibatkan, pemuda mengalami apa yang dapat disebut sebagai keterbatasan ruang sosial. Mereka memiliki energi dan potensi, tetapi tidak memiliki akses terhadap panggung pengambilan keputusan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya regenerasi kepemimpinan dan minimnya inovasi ekonomi berbasis generasi muda.

5. Persepsi Eksklusi: Temuan dari Metode Visual Partisipatif

Pendekatan visual partisipatif digunakan untuk memahami bagaimana generasi muda memaknai realitas sosial dan ekonomi desa dari perspektif mereka sendiri. Visualisasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa bayangan pemuda tentang desa masih didominasi oleh simbol-simbol seperti obor dan lilin, yang mencerminkan pengalaman hidup dalam keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Percakapan sehari-hari pemuda lebih banyak berkisar pada aktivitas hiburan dan konektivitas, yang mengindikasikan minimnya ruang dialog mengenai masa depan ekonomi desa.

Sementara itu, harapan pemuda dalam jangka 5–10 tahun ke depan didominasi oleh kebutuhan akan akses listrik, pendidikan, kepastian hukum atas lahan, serta munculnya figur kepemimpinan yang lebih inklusif. Temuan ini mengonfirmasi bahwa eksklusi pemuda dalam pembangunan desa tidak hanya terjadi pada tingkat ekonomi, tetapi juga pada tingkat simbolik dan institusional, di mana mereka memiliki aspirasi terhadap perubahan namun tidak memiliki akses terhadap sumber daya maupun proses pengambilan keputusan yang menentukan arah pembangunan desa.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan di Desa Tepian Langsung tidak ha-

nya terletak pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada distribusi akses terhadap aset produktif dan ruang partisipasi dalam tata kelola ekonomi desa. Dalam kerangka ekonomi politik, eksklusi generasi muda merupakan konsekuensi dari struktur kepemilikan aset dan relasi kuasa yang belum memberikan ruang bagi regenerasi ekonomi desa secara inklusif.

Dalam proses ini, anak muda diajak merefleksikan desanya melalui empat pertanyaan kunci:

- 1. Apa yang mereka bayangkan tentang Desa Tepian Langsung?
- 2. Apa yang sering dibicarakan anak muda di desa?
- 3. Perubahan apa yang tampak nyata dalam kehidupan desa?
- 4. Bagaimana harapan mereka terhadap desa ini dalam 5–10 tahun ke depan?

Setelah setiap pertanyaan diperkenalkan, peserta diminta menuangkan respon mereka dalam bentuk gambar bebas sesuai dengan imajinasi dan pengalaman masing-masing. Anak muda diajak merefleksikan desanya melalui empat pertanyaan kunci yang berkaitan dengan identitas desa, percakapan sehari-hari, perubahan yang mereka rasakan, serta harapan masa depan 5–10 tahun ke depan. Setelah mendiskusikan pertanyaan tersebut secara singkat, peserta diminta menggambar apa pun yang muncul di benak mereka. Gambar tidak dinilai

dari aspek estetika, melainkan dipahami sebagai representasi makna, cara anak muda membaca realitas dan membayangkan masa depan desanya.

Visual yang dihasilkan kemudian menjadi bahan diskusi dan refleksi bersama. Proses ini memungkinkan munculnya narasi-narasi yang sering kali tidak terucap, termasuk kegelisahan, rasa memiliki, keterputusan, maupun harapan. Dengan demikian, metode visual partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai ruang belajar dan kesadaran kritis bagi anak muda untuk melihat dirinya sebagai bagian dari masa depan Desa Tepian Langsung.

TABEL 4. 1
KLASIFIKASI
TEMUAN



Pertanyaan Kunci	Objek/Gambar Dominan	Tema Inti	Makna Utama	Isu Tersirat
Bayangan tentang desa	Sungai, jembatan, perahu, obor, lilin	Identitas & keterbatasan	Desa dipahami lewat pengalaman hidup dan memori kolektif	Ketimpangan akses listrik, isolasi wilayah, normalisasi keterbatasan
Pembicaraan anak muda	Hobi, infrastruktur komunitas, pancing, voli, tari	Keseharian & hiburan	Anak muda bicara soal hiburan dan konektivitas	Minim ruang dialog masa depan, keterputusan dengan agenda desa
Perubahan nyata	Kendaraan, kantor desa, sawit, masjid	Transisi fisik & lingkungan	Pembangunan tampak secara fisik	Risiko degradasi lingkungan, pembangunan tidak partisipatif
Harapan 5–10 tahun	Listrik, sekolah, SHM, figur pemimpin	Masa depan & rasa aman	Harapan hidup layak dan desa yang sejahtera	Ketakutan pada otoritas, lemahnya kepastian hukum, krisis kepemimpinan



1. KESIMPULAN PENELITIAN

Berdasarkan empat tujuan utama riset, berikut adalah ringkasan temuannya:

1. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Pendidikan:

Pemuda di Desa Tepian Langsung memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik dibanding generasi tua, namun hal ini belum berbanding lurus dengan pendapatan karena struktur ekonomi masih bergantung pada penguasaan aset fisik (lahan sawit). Terdapat mentalitas ketergantungan yang kuat akibat stabilitas hasil lahan plasma keluarga, sehingga dorongan untuk mencari alternatif ekonomi mandiri menjadi rendah.

2. Minat, Bakat, dan Potensi:

Potensi pemuda saat ini masih terfokus pada kegiatan sosial-rekreasional seperti olahraga (voli dan bulu tangkis) dan seni (tari). Namun, terdapat minat terpendam yang besar pada sektor ekonomi kreatif, digital, dan penguatan sektor agraris (pertanian/peternakan) yang lebih modern.

3. Pandangan dan Harapan Pemuda:

Pemuda merasa pelibatan mereka oleh Pemerintah Desa (Pemdes) masih bersifat prosedural dan pasif; mereka sering diundang rapat namun ide-idenya sering diabaikan atau diubah oleh dominasi figur orang tua. Harapan utama mereka adalah pemenuhan infrastruktur dasar—listrik, sinyal internet, dan air bersih—sebagai fondasi untuk berkembang.

4. Partisipasi dalam Pembangunan:

Partisipasi pemuda masih terjebak pada level "penerima manfaat" dan belum menjadi "penggerak". Hal ini disebabkan oleh sempitnya struktur peluang kerja di desa dan kurangnya akses terhadap modal sertaanggung pengambilan keputusan.

2. REKOMENDASI PRAKTIS (ACTION PLAN)

Agar rekomendasi dalam sumber lebih dapat dijalankan, berikut adalah langkah-langkah rencana aksi yang dapat dipertimbangkan:

2.1. Peran Pemerintah Kabupaten

- Perbaikan akses dan mobilitas: Mempercepat perbaikan jalan utama (jalan kabupaten) yang menghubungkan Desa Tepian Langsung dengan wilayah luar untuk memperlancar jalur distribusi logistik, hasil perkebunan dan mobilitas warga.
- Percepatan Sertifikasi Lahan: Memfasilitasi proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), difokuskan pada wilayah transmigrasi di Dusun 3, untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum lahan agar pemuda di sana memiliki aset yang sah sebagai modal jaminan usaha.



- Pemerataan Infrastruktur Strategis: Segera mengalokasikan anggaran untuk sambungan listrik PLN danaspalan jalan utama karena biaya energi dan logistik yang tinggi saat ini sangat membebani ekonomi rumah tangga.

2.2. Peran Pemerintah Desa

- Pelatihan tepat guna: Mengadakan pelatihan yang hasilnya bisa langsung diterapkan atau dimanfaatkan, seperti teknik pertanian padi apung, budidaya tanaman bernilai jual tinggi (durian, jengkol, petai), serta dukungan bagi kegiatan pemuda (olahraga, kreatif, digital).
- Pertanian produktif: Mengelola lahan cadangan desa yang belum ditanami sawit untuk dijadikan area pertanian produktif sebagai sumber pangan dan pendapatan alternatif warga.
- Pengaturan tata ruang: Menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Tata Ruang agar pembangunan desa lebih teratur dan lingkungan tetap terjaga.
- Verifikasi data: Melakukan verifikasi data warga secara berkala agar setiap bantuan atau program pembangunan tepat sasaran.
- Pelibatan generasi muda dan perempuan: Libatkan orang-orang muda dan perempuan secara aktif dengan memberikan mandat kepada Karang Taruna atau Kelompok Wanita Tani atau kader penggerak PKK untuk mengelola unit usaha strategis, seperti pengelolaan air

bersih desa atau layanan logistik pertanian, sehingga mereka berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi lokal.

- Insentif Pendidikan dan Sertifikasi: Mengingat pendidikan tinggi belum menjamin pendapatan, Pemdes dapat memberikan beasiswa atau bantuan sertifikasi keahlian (misal: operator alat berat, mekanik, atau teknisi listrik) yang relevan dengan industri di sekitar desa agar kompetensi pemuda lokal lebih kompetitif.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Anak Muda dan Perempuan: Menyelenggarakan forum pra-musyawarah khusus pemuda dan perempuan untuk menampung ide-ide inovatif tanpa tekanan dari figur senior dan tokoh masyarakat, sehingga aspirasi mereka benar-benar masuk ke dalam dokumen perencanaan desa (APBDes).

2.3. Peran Masyarakat

- Ruang Aspirasi Pemuda dan Perempuan: Menghidupkan kembali pertemuan informal di tingkat RT/Dusun untuk mendengar aspirasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan desa.
- Penguatan Forum Anak dan Orang Muda: Memfasilitasi forum anak dan kegiatan kepemudaan agar generasi muda terlibat aktif dalam kegiatan positif di desa. Selenggarakan festival seni & budaya, pertandingan olahraga, atau Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat desa.



- Transformasi Budaya Literasi Keuangan: Mendorong keluarga untuk mulai melakukan investasi produktif, menabung dana darurat atau asuransi pendidikan dan meninggalkan pola konsumsi ekspansif, guna menyiapkan kemandirian ekonomi anak-anak mereka di masa depan.
- Pemanfaatan Pekarangan dan Kebun Kolektif: Menggerakkan kelompok perempuan melalui kebun komunitas atau pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur atau tanaman obat guna memenuhi kebutuhan dapur sekaligus menghemat pengeluaran keluarga. Libatkan pemuda untuk berinovasi menggunakan teknologi pertanian sederhana guna menekan biaya hidup akibat ketergantungan pasokan sayur dan obat dari luar desa.

2.4. Peran Perusahaan

- Dukungan Akses Air Bersih dan Sanitasi: Memprioritaskan program penyediaan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna yang mudah dioperasikan dan dirawat secara mandiri oleh warga desa.
- Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa Berkelanjutan: Memberikan pendampingan berkelanjutan bagi unit usaha, lembaga ekonomi desa maupun kelompok tani untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan mereka, sehingga mampu menjadi motor ekonomi desa yang mandiri.

- Sinkronisasi Bantuan Perusahaan dengan Rencana Pembangunan Desa: Menyelaraskan alokasi bantuan perusahaan dengan rencana pembangunan desa agar tercipta kerja sama yang terpadu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- Pengembangan "Digital Learning Hub": Alih-alih hanya memberi bantuan hibah insidental, perusahaan dapat membangun ruang bersama (co-working space) yang dilengkapi dengan Starlink dan pembangkit listrik mandiri (solar panel atau genset) agar pemuda bisa mengakses pendidikan daring dan ekonomi digital.
- Pendampingan Bisnis Hilir: Memberikan pelatihan dan modal kerja untuk mengolah hasil kebun (sawit atau sayur) menjadi produk bernilai tambah (misal: pakan ternak dari bungkil sawit), bukan sekadar pelatihan tata boga yang berhenti di tengah jalan karena tidak ada keberlanjutan pemasaran.



1. Aprilia, Anisa., dkk. (2019). Preference of Rural Youth Live-
lihood in Indonesia Rural Areas and Its Factors. *Habitat*
30(3), 88-95.

2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Garis Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota per Kapita per Bulan. [https://
www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI0IzI=/garis-kemis-
kinan-menurut-kabupaten-kota.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI0IzI=/garis-kemis-
kinan-menurut-kabupaten-kota.html).

3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur.
(2025). Kecamatan Bengalon Dalam Angka. [https://ku-
timkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/d8a63fc-
503f19145aa4e3c35/kecamatan-bengalon-dalam-ang-
ka-2025.html](https://ku-
timkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/d8a63fc-
503f19145aa4e3c35/kecamatan-bengalon-dalam-ang-
ka-2025.html).

4. Bou Dib, Jonida., dkk. (2018). Land-Use Change and Live-
lihood of non-farm Households: The Role of Income from
Employment in Oil Palm and Rubber in Rural Indonesia.
Land Use Policy.

5. Davino Sayaza, Mas dan Endah Nadiya Stephanie. (2025).
Rural Livelihood Diversification and Economic Adaptation
in East Kalimantan: Evidence from Six Village Communiti-
es. *Jurnal Rekayasa Lingkungan dan Biosisten* 3(1), 53-64.

6. Griffin, Christina., dkk. (2024). The Persistence of Precarity:
Youth Livelihood Struggles and Aspirations in the Context
of Truncated Agrarian Change, South Sulawesi, Indone-
sia. *Agriculture and Human Values* 41, 293-311.

7. Krishna, Vijesh V. dan Christoph Kubitz. (2021). Impact of
Oil Palm Expansion on the Provision of Private and Com-
munity Goods in Rural Indonesia. *Ecological Economies*
179.

8. Kubitz, Christoph., dkk. (2018). The Economics Behind an
Ecological Crisis: Livelihood Effects of Oil Palm Expansion
in Sumatra, Indonesia. *Human Ecology*.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-
Des) Desa Tepian Langsat Tahun 2023.

TABEL 4. 2
HASIL ANALISIS
REGRESI



	Penghasilan
Luas Lahan (Ha)	332384.0 (241380.1)
Kategori Usia (1=Pemuda)	-752499.6 (816178.7)
SD	478433.5 (1456509.5)
SMP	1087951.4 (1533541.0)
SMA	1335338.6 (1586148.7)
PT	1796721.6 (2254730.4)
Jawa	-2133620.8* (1140734.1)
Bugis	-2068765.8* (1087647.7)
Lainnya	-2043615.5 (1406340.5)
Pertanian/Perkebunan	28580.0 (1398633.8)

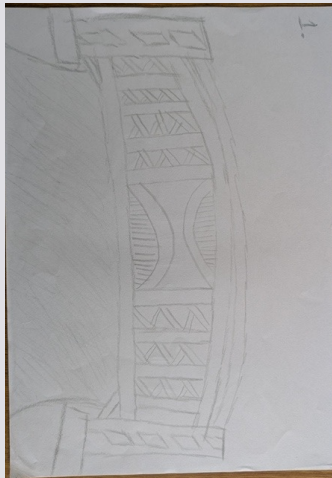
	Penghasilan
Dagang/Jasa	1656726.0 (1399053.5)
Informal/Lainnya	-866603.3 (1416451.9)
Jenis Kelamin (1=Laki-laki)	424930.6 (718762.2)
Dusun 2	-105556.1 (1110364.4)
Dusun 3	-102641.3 (1756341.3)
Constant	7680327.9*** (1900230.1)
Observations	90

Standard errors in parentheses
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

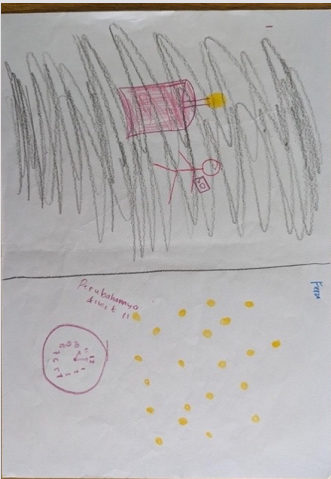


Apa yang kamu bayangkan tentang Desa Tepian Langsat?

Bayangan anak muda terhadap Desa Tepian Langsat tidak direpresentasikan melalui simbol kemajuan, melainkan melalui infrastruktur dasar dan pengalaman keterbatasan: sungai, jembatan, perahu, obor, dan lilin. Dominasi simbol-simbol tersebut menunjukkan bahwa identitas desa dibangun dari pengalaman hidup yang bersifat elementer—akses mobilitas, penerangan, dan keterhubungan antarwilayah. Lilin dan obor bukan sekadar alat penerang, melainkan representasi dari normalisasi keterbatasan energi. Dalam konteks ini, anak muda tidak membayangkan desa sebagai ruang potensi ekonomi atau ruang inovasi, tetapi sebagai ruang bertahan hidup. Imajinasi kolektif mereka masih berakar pada memori keterbatasan, bukan pada proyeksi kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran struktural anak muda masih terjebak dalam realitas infrastruktur minimum, sehingga imaji mereka belum bergeser ke arah transformasi ekonomi atau penguatan kapasitas manusia.

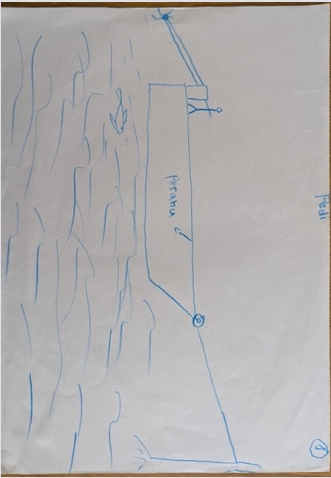


Peserta menggambar sebuah jembatan di desa tepian langsung yang menghubungkan antar RT dan sebagai akses utama warga.

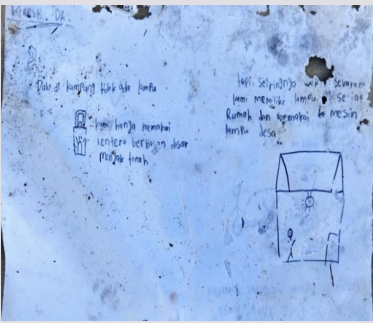


Lilin sebagai alat penerang di rumah karena tidak ada listrik.

Listrik hanya hidup dari pukul 18.00 – 23.00.



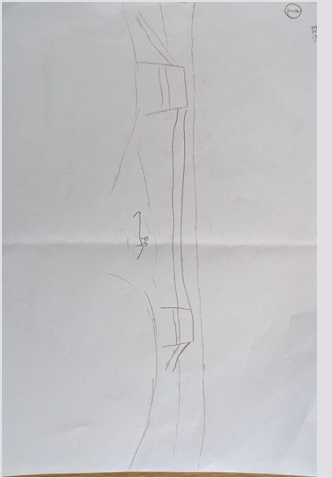
Peserta menunjukkan bahwa perahu dulu adalah transportasi yang krusial. Terlebih jika sungai meluap, warga menggunakan perahu untuk mobilisasi.



Desa tepian langsung tidak memiliki lampu dan penerangan hanya ada obor.



Gambar obor menunjukkan kisah masa lalu peserta saat disuruh orang tuanya untuk menghidupkan obor di depan rumah saat dia masih SD.



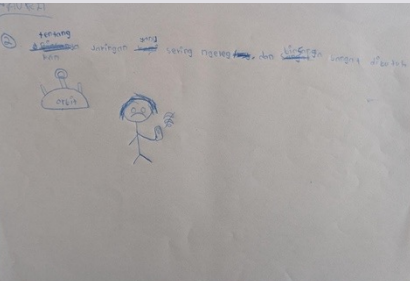
Sungai dan jembatan adalah pemandangan yang sangat familiar ditemukan di desa tepian langsung, sebab desa ini berbatasan langsung dengan sungai.



Ada seseorang yang kerap marah saat merespon beberapa hal, baru kemudian dilanjutkan dengan bertanya.

Apa yang sering anak muda bicarakan di Desa?

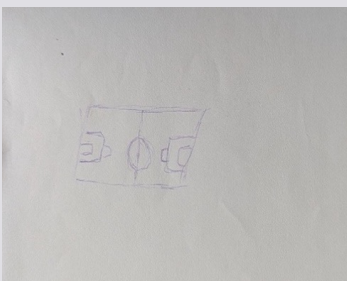
Tema percakapan anak muda didominasi oleh isu keterbatasan infrastruktur, kegiatan sehari-hari, dan hiburan. Secara permukaan, ini tampak sebagai ekspresi keseharian yang wajar. Namun secara kritis, dominasi isu sinyal menunjukkan adanya kebutuhan akan konektivitas informasi yang belum terpenuhi secara memadai. Sinyal bukan hanya soal akses media sosial, melainkan simbol keterhubungan dengan dunia luar. Percakapan yang berulang tentang susahny jaringan 4G mengindikasikan adanya kesadaran akan keterisolasian digital. Sementara itu, memancing dan olahraga merepresentasikan bentuk rekreasi berbasis ruang alam yang tersedia, bukan ruang produktif ekonomi. Minimnya pembicaraan tentang rencana usaha, pendidikan lanjutan, atau peluang kerja memperlihatkan adanya keterputusan antara anak muda dan agenda pembangunan desa. Diskursus kepemudaan masih terfokus pada kegiatan sosial dan hiburan, bukan pada artikulasi masa depan kolektif. Ini menunjukkan belum terbentuknya ruang dialog kritis yang mendorong pemuda menjadi aktor pembangunan.



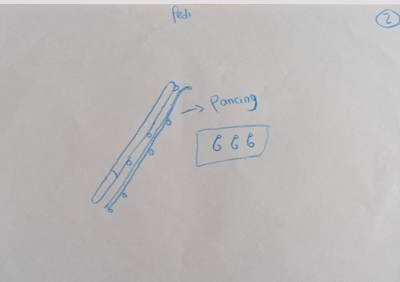
Susahny sinyal di desa tepian membuat hal ini tiada henti untuk dibicarakan antar teman sebaya. Sebab jaringan merupakan akses untuk mengetahui informasi di kanal media sosial.



Beberapa pemuda sering membicarakan bahwa memancing adalah hiburan mereka. Pemukiman yang dekat dengan sungai membuat warga mudah untuk mengakses lokasi memancing ikan.



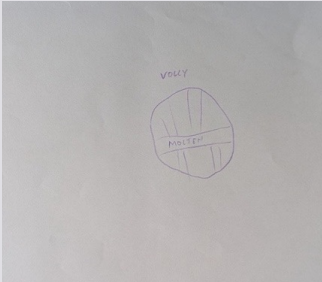
Olahraga adalah salah satu aktivitas yang dapat menjadi hiburan warga desa tepian langsung setiap sore. Turnamen antar desa menjadi bahasan yang menarik pada anak mudanya.



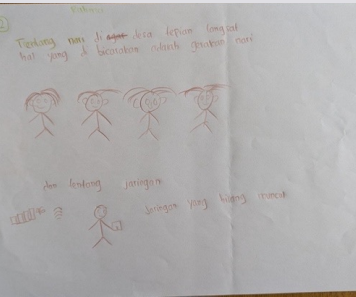
Memancing adalah aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat di sungai, maka alat pancing menjadi suatu hal yang kerap menjadi pembahasan di kelompok sebaya (harga dan kualitas).



Kondisi di tepian langsung yang tidak memiliki listrik membuat hal ini menjadi perbincangan yang selalu ada.



Voli setiap sore adalah olahraga yang digemari pemuda desa tepian langsung dan beberapa turnamen telah diikuti.



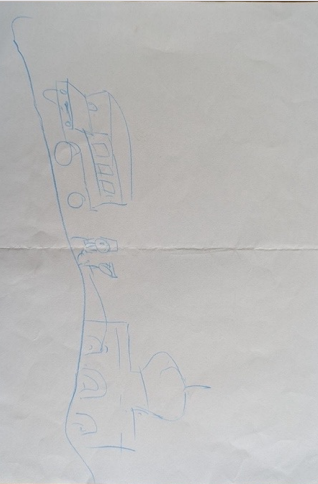
Berlatih tari tradisional maupun modern. Sebagai pemudi, ini menjadi hobi dan hiburan mereka.



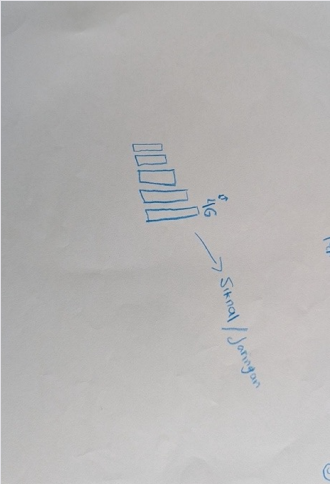
Sinyal 4G(sinyal yang kuat) merupakan impian banyak orang di desa tepian langsung.

Apa perubahan yang tampak nyata?

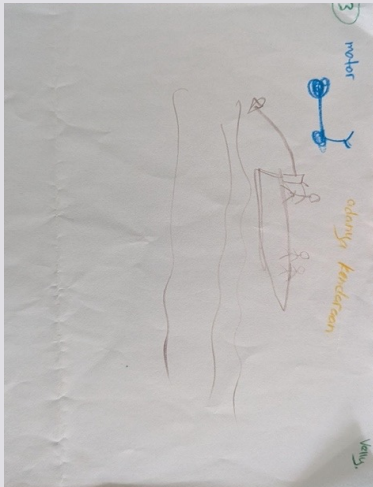
Perubahan yang digambarkan anak muda bersifat fisik dan simbolik: kepemilikan kendaraan, pembangunan kantor desa, peningkatan akses sinyal, peningkatan aktivitas keagamaan, serta transformasi hutan heterogen menjadi kebun sawit. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi perubahan diukur dari indikator visual dan material, bukan dari perubahan kualitas hidup secara mendalam. Peralihan dari perahu ke motor menandakan mobilitas yang meningkat, tetapi sekaligus memperlihatkan pergeseran struktur ekonomi menuju ketergantungan pada komoditas sawit. Transformasi hutan menjadi sawit dipersepsikan sebagai kemajuan, namun secara ekologis berpotensi menciptakan kerentanan jangka panjang. Anak muda menangkap perubahan sebagai “terang menuju harapan”, tetapi belum sepenuhnya merefleksikan konsekuensi lingkungan dan ketimpangan kepemilikan aset yang menyertainya. Dengan kata lain, perubahan dipahami sebagai pembangunan fisik, bukan sebagai restrukturisasi relasi ekonomi dan sosial.



Dari yang dulunya masyarakat tidak memiliki kendaraan sekarang memiliki kendaraan sendiri (masyarakat transmigran). Beberapa masyarakat yang dulunya tidak rajin ibadah sekarang mulai memenuhi masjid.



Dulu sama sekali tidak ada sinyal sama sekali, bahkan kadang harus pergi ke area gunung, sekarang di beberapa titik sudah bisa memanfaatkan sinyal, juga melalui starlink.



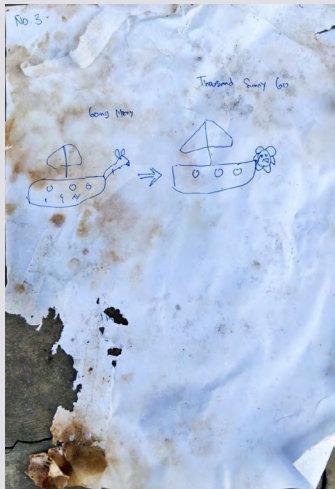
Dulu orang kebanyakan tidak memiliki kendaraan, dan menjadikan perahu sebagai satu satunya kendaraan. Sekarang masyarakat sudah aktivitas menggunakan motor.



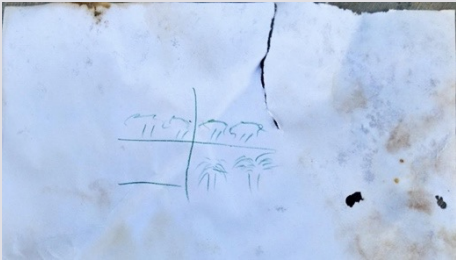
Dulu tidak ada bangunan kantor, sekarang sudah lengkap dengan adanya berbagai kantor yang berada di satu area pemerintahan. Ada kantor desa, LPM, dan PKK.



Dulu desa tepian langsung kebanyakan adalah hutan heterogen, sekarang banyak beralih menjadi hutan sawit.



Desa tepian langsung berada pada masa transisi perubahan menuju cahaya harapan. Pergi meninggalkan ‘kapal’ yang kondisinya sudah sangat rusak



Dulu masih banyak hutan heterogen, sekarang menjadi kebun sawit.



Dulu tidak ada bangunan kantor, sekarang sudah lengkap dengan adanya berbagai kantor yang berada di satu area pemerintahan. Ada kantor desa, LPM, dan PKK.

